



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI SUAKA ALAM PERAIRAN  
KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Propinsi Papua Barat, perlu menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014 - 2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 - 2034.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan operasional pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
- KETIGA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

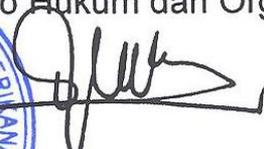
Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI  
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT  
DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2014 – 2034

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemitas sumber daya pesisir dan laut yang tinggi. Indikasi ini telah diperkirakan sejak lama dengan adanya beberapa kegiatan penelitian di Raja Ampat seperti datangnya kapal Perancis L'Uranie (1818-19), La Coquille (1823), L'Astrolabe (1826), dan peneliti Peter Bleeker (1860-an), Alfred Wallace (1860-1861) dan Snellius (1920). Sejak tahun 2000, Conservation International (CI) dan The Nature Conservancy (TNC) melakukan serangkaian penelitian di Raja Ampat terutama untuk mengetahui status keanekaragaman hayati laut di kepulauan ini. Melalui serangkaian survei ini kemudian para ahli kelautan menyatakan bahwa wilayah Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang paling tinggi dunia. Kepulauan ini memiliki setidaknya 1.318 jenis ikan karang (Allen dan Erdmann, 2009) dan 533 jenis karang keras (Turak dan Devantier, 2008).

Dalam konteks regional, Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya termasuk dalam kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle*) dan merupakan bagian kawasan penting keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Kawasan segitiga karang ditandai dengan adanya 500 atau lebih jenis karang dan merupakan pusat dari kelimpahan dan keragaman karang di bumi. Kawasan segitiga karang ini meliputi 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Sumber daya hayati

pesisir dan laut yang tinggi dan luar biasa di kawasan segitiga karang dapat menjadi sumber protein, pendapatan dan penghidupan bagi lebih 120 juta masyarakat didalamnya yang tergantung dari kegiatan perikanan. Selain itu, kawasan ini juga bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wisata, serta dapat melindungi masyarakat pesisir dari bahaya badai dan tsunami.

Potensi karang dan ikan karang yang tinggi dengan kondisi yang secara umum masih baik, serta pemandangan pantai dan pulau-pulau yang indah, menjadikan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya sebagai salah satu tujuan wisata laut seperti kegiatan menyelam dan *snorkeling* yang banyak dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara. Data dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Selain itu pendapatan dari *conservation fee* melalui tiket masuk dan jumlah *resort* yang ada juga menunjukkan peningkatan. Berbagai informasi tentang Raja Ampat telah dipublikasikan baik skala nasional maupun internasional.

Untuk menjamin kelestarian sumber daya dan manfaatnya dalam jangka panjang, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan upaya-upaya pengelolaan melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Raja Ampat. Sampai saat ini, di Kepulauan Raja Ampat terdapat 2 (dua) buah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, dan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut sekitarnya dengan luas masing-masing 60.000 ha dan 125.000 ha, serta 6 buah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yaitu KKPD Kepulauan Ayau-Asia (101.440 ha), KKPD Sayang-Wayag (155.000 ha), KKPD Teluk Mayalibit (53100 ha), KKPD Selat Dampier (303.200 ha), KKPD Kepulauan Kofiau-Boo (170.000 ha), dan KKPD Misool Timur Selatan (343.200 ha).

Kedelapan KKP di Kabupaten Raja Ampat ini membentuk sebuah jejaring KKP karena adanya keterkaitan biofisik antara satu dengan lainnya. Hasil beberapa studi menunjukkan adanya hubungan dari aspek penyebaran larva ikan dari satu KKP sebagai tempat pemijahan dengan KKP lainnya sebagai tempat pembesaran. Studi lainnya menunjukkan adanya hubungan antara tempat bertelur penyu di satu KKP dengan tempat makan penyu di KKP lainnya. Sebagai sebuah jejaring, maka keseluruhan KKP di Raja Ampat perlu dikelola agar dapat memberikan

manfaat sesuai dengan tujuan pembentukan dari masing-masing KKP maupun sebagai sebuah jejaring KKP.

Status SAP Kepulauan Raja Ampat relatif masih baru, karena pengelolaannya diserahkan oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Maret 2009 sebagai bagian dari penyerahan 8 kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang dikelola Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Serah terima pengelolaan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2009 dengan Berita Acara No. BA.01/Menhut-IV/2009 dan No. BA.108/MEN.KP /III/2009.

Menindak lanjuti penyerahan SAP tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen KP) No.Kep.64/Men/2009 tentang Penetapan KKPN Raja Ampat dan Laut sekitarnya. Dalam Kepmen KP tersebut dinyatakan bahwa KKPN ini ditetapkan sebagai Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat.

Sebagai konsekuensi penunjukan status kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat, maka perlu disusun suatu rencana pengelolaan. Penyusunan rencana pengelolaan didasarkan pada fungsi ekologis, pola pemanfaatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pola pengelolaan kawasan harus bersifat jelas, komprehensif, sistematis dan mengakomodasi setiap kemungkinan pengembangannya. Rencana pengelolaan disusun agar pemantauan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat tetap mempertahankan fungsi sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi ini merupakan penjabaran dari arahan umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2010. Proses penyusunan dokumen ini telah melibatkan para pihak baik di tingkat propinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mawadahi kepentingan pemerintah dan masyarakat diseluruh tingkatan.

## B. Tujuan

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, bertujuan:

1. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan program pengelolaan kawasan selama 20 (dua puluh) tahun (2013-2033).
2. Menjadi arahan strategis pengembangan Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat.

3. Menetapkan pemintakatan kawasan konservasi (zonasi) sesuai fungsi dan rencana pengembangan kawasan yang mengikat bagi pengelolaan Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat selama 20 tahun dan acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

### C. Ruang Lingkup

#### 1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Lingkup Wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat yaitu wilayah perairan seluas 60.000 hektar terletak dibagian selatan Pulau Waigeo.

#### 2. Lingkup Materi Perencanaan

Ruang lingkup materi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat meliputi:

- a. Kondisi umum kawasan meliputi deskripsi potensi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya
- b. Identifikasi isu dan permasalahan pengelolaan
- c. Kebijakan pengelolaan meliputi kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten
- d. Penataan zonasi meliputi zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, zona perlindungan, zona rehabilitasi, dan zona pelabuhan
- e. Rencana pengelolaan meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah
- f. Pentahapan dan penjadwalan.

#### 3. Lingkup Waktu Perencanaan

Lingkup waktu Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat terdiri dari :

- a. Rencana Jangka Panjang 20 tahun; dan
- b. Rencana Jangka Menengah (5 tahun).

BAB II  
POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN

A. Potensi

1. Potensi Fisik Kawasan

a. Lokasi Kawasan

Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat seluas 60.000 ha terletak dibagian selatan Pulau Waigeo. Dalam SAP ini terdapat sebanyak 36 pulau kecil yang sebagian merupakan pulau karst dengan 4 kampung didalamnya dan 1 kampung di Sekitarnya. Sementara itu, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Kelautan (Kepmen KP) Nomor KEP/64/MEN/2009, batas-batas geografis SAP Kepulauan Raja Ampat berupa titik koordinat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Titik Koordinat Batas dan Luas kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.64/Men/2009

ID	X	Y	Luas Kawasan (Ha)
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	
1	130° 18' 32"	0° 14' 18"	60.000
2	130° 32' 10"	0° 18' 3"	
3	130° 22' 13"	0° 28' 12"	
4	130° 10' 29"	0° 24' 29"	

Titik koordinat yang ada dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009, setelah dilakukan analisis sistem informasi geografis ditemukan bahwa batas koordinat tersebut tidak sesuai dengan luasan dan peta penetapan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang.

Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui bahwa gambar peta dalam KEP.64/MEN/2009 sudah sesuai, namun titik koordinatnya yang tidak sesuai. Selama ini sosialisasi yang telah dilakukan dikawasan adalah menggunakan gambar peta sesuai KEP.64/MEN/2009, oleh karena itu koordinat batas kawasan yang digunakan pada rencana pengelolaan dan rencana zonasi SAP

Kepulauan Raja Ampat sesuai dengan hasil survei lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Titik Koordinat Batas SAP Kepulauan Raja Ampat

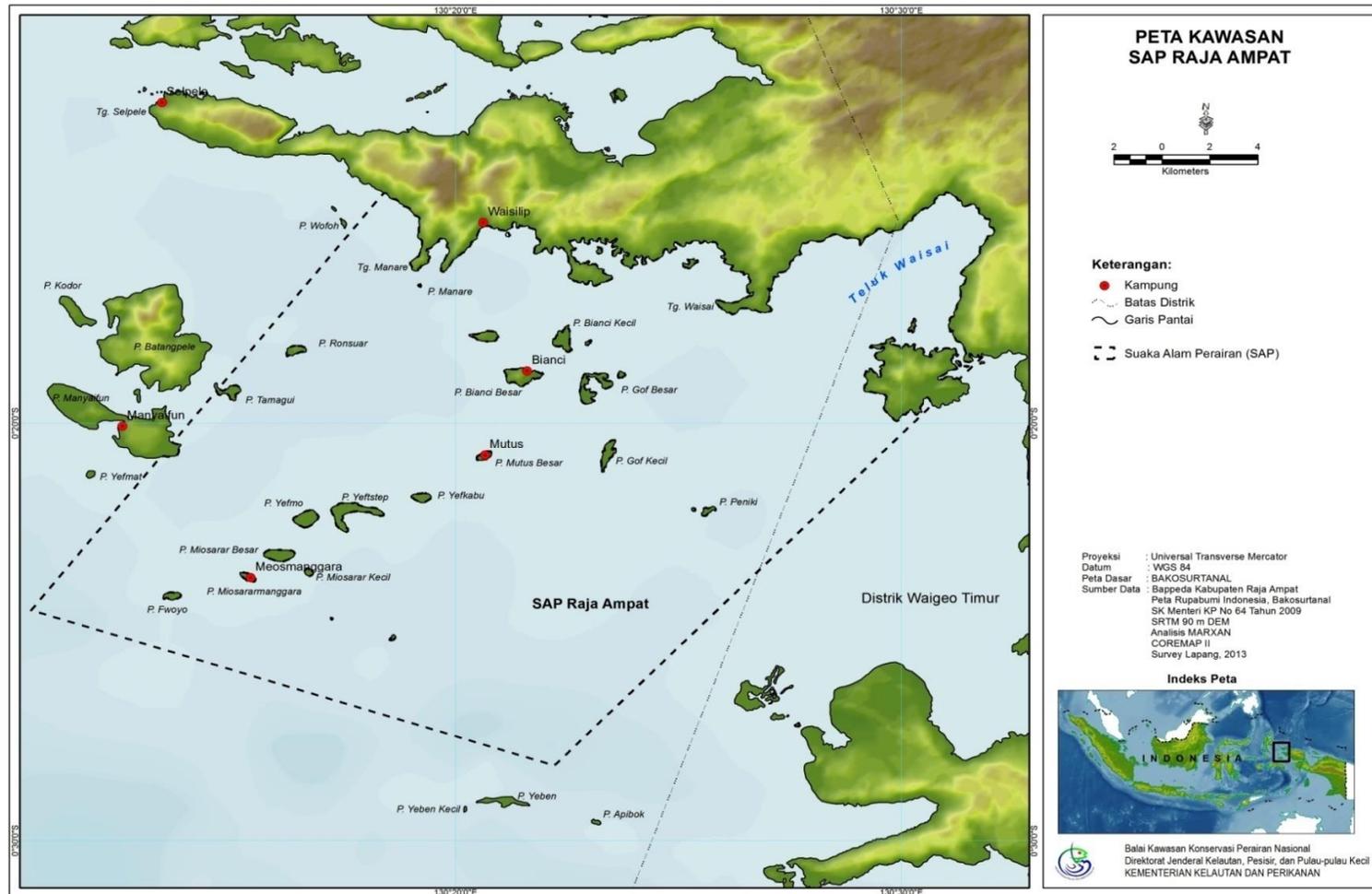
No. Koordinat	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (X)	Lintang Selatan (Y)
1	130° 17' 47.83" BT	0° 14' 11.48" LS
2	130° 10' 29.00" BT	0° 24' 29.00" LS
3	130° 22' 13.08" BT	0° 28' 12.00" LS
4	130° 32' 34.09" BT	0° 18' 42.94" LS

## b. Kondisi Fisik Kawasan

### a. Suhu Perairan

Pengaruh Samudera Pasifik di bagian utara dan Laut Banda di bagian selatan sangat mempengaruhi sebaran suhu permukaan laut (SPL) di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang terletak di wilayah tropis (1° 00' LU – 2° 15' LS) memiliki suhu permukaan yang relatif hangat dengan variasi tahunan yang cukup kecil. Rata-rata suhu permukaan di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya berkisar antara 28,5°C – 31,8°C (Pemda Raja Ampat, 2006).

Hasil yang didapat dari pengamatan suhu permukaan di lapangan tidak jauh berbeda dengan peta laut BPPT tahun 2000. Pada peta menunjukkan bahwa pada bulan Januari suhu permukaan di Perairan Raja Ampat berkisar antara 28,5 – 29°C ke arah timur laut (Samudera Pasifik), pada bulan Februari dan Maret suhu masih relatif sama, sedangkan pada bulan April berkisar antara 29 – 29,5°C. Pada bulan Mei dan Juni masih memperlihatkan nilai yang sama dan pada bulan Juli suhu turun hingga mencapai 28,5°C sedangkan pada bulan Agustus suhu kembali mencapai 29°C.



Gambar 1. Peta Kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dalam KEP.64/MEN/2009

Pada bulan ini SPL di perairan Samudera Pasifik tinggi sekali yakni berkisar antara 29 – 29,5<sup>o</sup>C sehingga masa air mempengaruhi suhu pada bagian utara Perairan Raja Ampat, sedangkan di selatan kawasan ini suhu lebih dingin yakni berkisar antara 28 – 28,5<sup>o</sup>C hal ini disebabkan adanya pengaruh massa air dingin dari Laut Banda (BPPT, 2001).

Profil suhu perairan secara vertikal menunjukkan adanya perubahan secara gradual, dengan perkiraan penurunannya 0,05<sup>o</sup>C/m. Perubahan yang perlahan-lahan ini disebabkan karena proses pencampuran massa air yang berjalan cukup sering dan lancar pada lapisan permukaan, karena ombak, angin dan arus. Makin ke dalam, proses pencampuran itu makin berkurang dan lemah sehingga perubahan suhu air terlihat makin menyolok dari suatu kedalaman ke kedalaman berikutnya.

#### b. Salinitas

Selain suhu, salinitas di sekitar SAP Kepulauan Raja Ampat juga merupakan indikator untuk mempelajari penyebaran massa air di lautan karena itu dapat dikatakan penyebaran nilai-nilai salinitas secara langsung menunjukkan penyebaran dan peredaran massa air dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dari hasil pengamatan, salinitas di lapisan permukaan SAP Kepulauan Raja Ampat berkisar antara 30 – 35 psu, pada kedalaman 10 meter berkisar antara 32 – 35 psu. karena tidak terdapatnya sungai-sungai yang mengalir ke perairan SAP, sehingga tidak ada pengenceran diperairan di sekitar SAP. Variasi turunnya salinitas di perairan SAP disebabkan banyaknya air tawar pada saat musim hujan.

Sebaran salinitas di bagian utara SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat berkisar antara 33–35 psu. Tingginya kadar salinitas pada perairan ini disebabkan adanya pengaruh masa air dari Samudera Pasifik.

#### c. Kecerahan

Dari hasil pengamatan, kecerahan maksimum berada di perairan sekitar kepulauan Wayag dan Sayang, karena rendahnya bahan tersuspensi akibat sedimentasi dari daratan kepulauan Wayag- Sayang dan Waigeo Barat. Apabila mengacu

pada baku mutu air laut menurut Kepmen LH. No. 02/1988. Secara umum kecerahan Perairan Raja Ampat dengan rata-rata 12,91 m masih tergolong baik, yang cocok untuk taman laut/konservasi maupun untuk biota laut/budidaya. Menurut Kepmen LH tersebut kecerahan air laut yang diperbolehkan untuk taman laut/konservasi sekitar 10 m dan yang diinginkan sekitar 30 m, sedangkan untuk biota laut/budidaya kecerahan air laut yang diperbolehkan 3 m dan yang diinginkan >5 m.

#### d. Arus

Pola arus di Perairan Raja Ampat dipengaruhi oleh Arus Khatulistiwa Utara (*North Equatorial Current*) dan Arus Khatulistiwa Selatan (*South Equatorial Current*), karena letak kepulauan Wayag-Sayang Raja Ampat persis di garis khatulistiwa. Arus Khatulistiwa Utara, merupakan arus panas yang mengalir menuju ke arah barat sejajar dengan garis khatulistiwa dan ditimbulkan serta didorong oleh angin pasat timur laut, sedangkan Arus Khatulistiwa Selatan, merupakan arus panas yang mengalir menuju ke barat sejajar dengan garis khatulistiwa. Arus ini ditimbulkan atau didorong oleh angin pasat tenggara. Pada bulan Desember - Februari, arus musim barat mengalir menuju timur. Pada musim pancaroba (April) arus ke timur ini mulai melemah bahkan mulai berbalik arah hingga di beberapa tempat terjadi olakan-olakan (Eddies). Pada bulan Juni - Agustus barulah bergerak arus musim timur dan arah arus sepenuhnya berbalik ke barat yang akhirnya menuju Laut Cina Selatan (Nontji, 1993; Tomczak & Godfrey, 1994).

Pola arus di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari Samudera Pasifik Barat (*Western Pacific Ocean*) yang bergerak dari arah timur menuju barat laut (*North West*) dan sejajar dengan daratan Papua bagian utara. Ketika arus ini tiba di Laut Halmahera atau bagian utara Kepulauan Raja Ampat arus tersebut sebagian bergerak ke selatan dan sebagian berbalik menuju Samudera Pasifik. Arus ini dikenal sebagai Halmahera Eddie. Diduga sebagian arus ini memasuki perairan Kepulauan Raja Ampat (Tomczak & Godfrey, 1994). Dari hasil pengamatan di lapangan, didapatkan bahwa arus di Perairan Raja Ampat didominasi oleh pengaruh angin, namun

untuk wilayah teluk dan pulau-pulau kecil yang berdekatan pola arusnya lebih dipengaruhi oleh pasang surut.

e. Gelombang

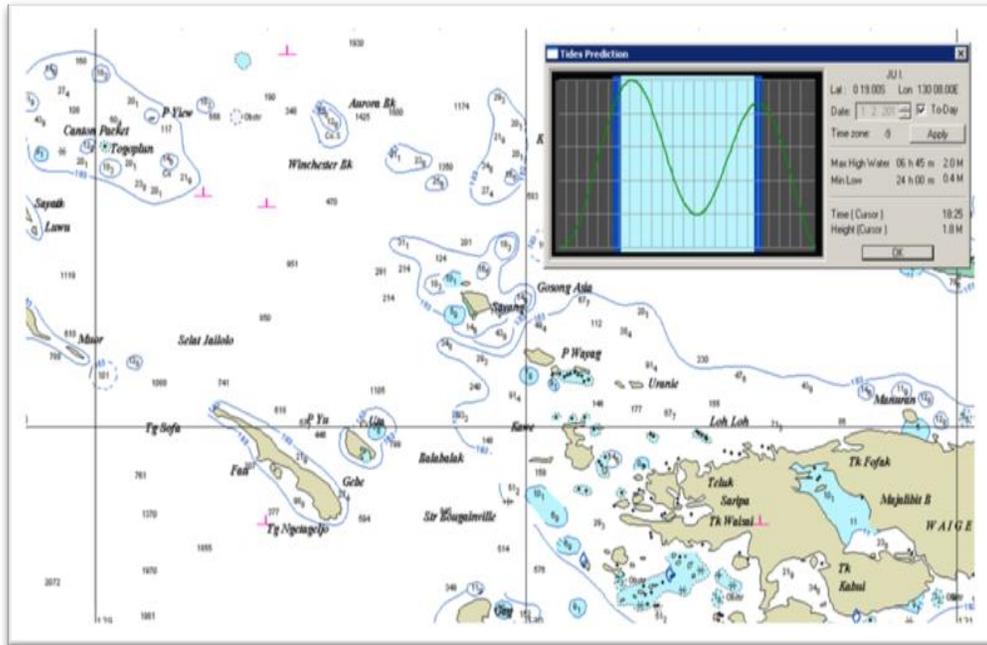
Gelombang laut merupakan tanda dari gerakan air laut yang dapat diamati. Berdasarkan letak geografisnya SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat terletak antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Banda. Maka dapat dikatakan bahwa gelombang yang merambat masuk ke perairan ini adalah gelombang yang berasal dari Laut Banda di bagian selatan dan Samudera Pasifik di bagian utara serta Samudera Hindia di bagian barat.

Tingginya gelombang pada perairan ini disebabkan oleh hembusan angin yang datang dari arah utara (Samudera Pasifik). Sedangkan di perairan terlindung seperti Perairan Waigeo umumnya tinggi gelombang berkisar antara 0-1 meter.

f. Pasang Surut

Pasang surut (pasut) adalah proses naik turunnya muka laut yang hampir teratur. Gaya pembangkit pasut adalah gaya tarik bulan dan matahari. Karena posisi bulan dan matahari selalu berubah, maka besarnya kisaran pasut juga berubah mengikuti perubahan posisi tersebut. Pasang surut mempunyai arti yang sangat penting bagi keselamatan pelayaran. Juga bila seorang peneliti ingin meneliti di daerah intertidal maka terlebih dahulu harus tahu tentang pasang surut, selain itu pasang surut juga sangat penting bagi pertambahan pantai.

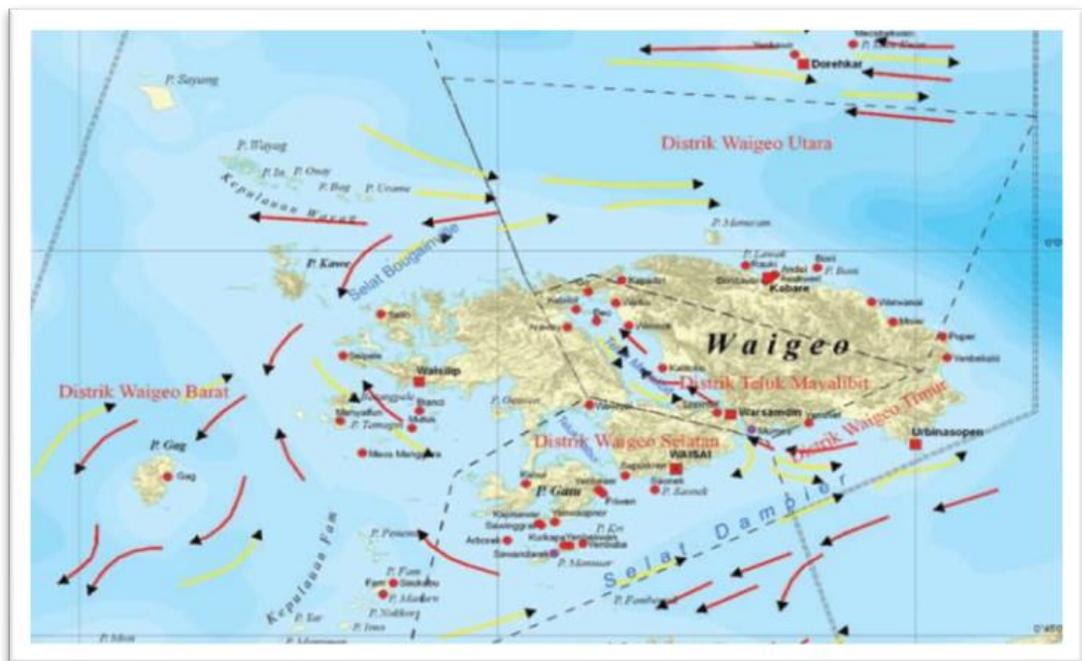
Dari hasil pemantauan Dinas Hidrooseanografi TNI AL dan analisis dengan menggunakan software navigasi CMAP, tipe pasut Perairan Raja Ampat adalah campuran dengan dominasi pasut ganda (nilai  $F$  berkisar antara 0,25–1,50). Jenis pasut ini berarti dalam satu hari terdapat dua kali pasang dan surut serta tinggi pasang pertama tidak sama dengan tinggi pasang kedua. Pada saat pasang naik tinggi muka air sekitar 2 m. Gambar 2 menjelaskan tentang tipe pasang surut di wilayah perairan Raja Ampat.



Gambar 2. Gambaran tipe pasang surut di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

g. Arus Pasang Surut

Pada siang menjelang tengah hari dan malam, pada saat pasang tertinggi kedua menuju surut. Arus menunjukkan sudah berbalik arah pada saat pagi hari (sekitar jam 6) dan sore (sekitar jam 18). Sebagai konsekuensi dari fenomena pasang surut dimana posisi muka laut secara periodik akan berubah-ubah sesuai dengan waktu. Gambar 3 menunjukkan pola arus saat posisi muka laut berada pada saat pasang tertinggi.



Gambar 3. Pola Arus pada saat pasang tinggi di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya

## 2. Potensi Ekologis

### a. Ekosistem Pesisir dan Laut

Hasil Manta Tow CI pada 2010 disekitar pulau-pulau kecil di SAP Kepulauan Raja Ampat diketahui tipe terumbu karang yang ditemukan terdiri dari karang tepi (*fringing reef*) dan karang gosong (patch reef) dengan kontur landai hingga curam (*drop off*). Kondisi pantai pada pulau-pulau tersebut adalah pantai pasir putih, pantai berbatu, pulau karst dan pantai bermangrove. Beberapa memiliki ekosistem padang lamun. Persentase penutupan karang hidup berkisar antara 0 – 70% dengan rata-rata persentase penutupan sebesar 30.97%. Rata-rata penutupan karang mati sebesar 15.06%, patahan karang sebesar 18.50%, pasir sebesar 19.66% dan penutupan biota lain sebesar 15.80%.

Sebagian terdapat padang lamun dan di beberapa tempat terdapat mangrove yang langsung berbatasan dengan lamun dan terumbu karang di depannya (*blue water mangrove*). Tipe terumbu karang di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat adalah tipe terumbu karang tepi (*fringing reef*) dengan kontur landai hingga curam. Terumbu karang hanya terdapat di dangkalan dari 0 - 15 m, selebihnya adalah berlumpur atau berpasir. Persentase penutupan karang hidup berkisar antara 5- 50% dengan rata-rata persentase penutupan sebesar 20.86%. Rata-rata penutupan karang mati sebesar 21.28%, patahan karang sebesar 19.06%, pasir sebesar 28.53% dan penutupan biota lain sebesar 10.28%.

Secara umum dapat dikatakan rata-rata persentase penutupan karang hidup di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebesar 26.61%. Dibeberapa tempat ditemukan kerusakan karang hingga 50% penutupan patahan karang. Hal ini diduga kuat karena adanya kegiatan perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan meliputi bom dan potassium yang sampai sekarang masih berlangsung.

### b. Sebaran Biota Laut

Perairan disekitar pulau-pulau SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat merupakan tempat mencari makan penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Perairan dibebeberapa pulau diduga

sebagai area pemijahan ikan kerapu di beberapa pulau. Pada umumnya disekitar pulau-pulau mudah ditemukan kima raksasa (*Tridacna gigas*), keong terompet (*Charonia tritonis*), keong kepala kambing (*Cassis cornuta*), lola (*Trochus niloticus*), ketam kenari (*Birgus latro*) dan duyung (*Dugong dugon*). Perairan sekitar SAP ini merupakan tempat perlintasan beberapa jenis paus dan lumba-lumba (Pemda Raja Ampat, 2006).

### 3. Potensi Ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di kampung-kampung sekitar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat hampir sama dengan mata pencaharian penduduk di pulau-pulau kecil lainnya yaitu sebagai nelayan. Mata pencaharian sampingan dengan berkebun atau mengumpulkan hasil hutan disekitar kampung. Jumlah nelayan di Kampung ManyaiFun sebanyak 41 orang (82%), Waisilip 23 orang (50%), Bianci 44 orang (73%), Mutus 83 orang (97%) dan Meosmanggarar 47 orang (74%). Hasil tangkapan ikan utamanya untuk konsumsi keluarga. Wilayah tangkap nelayan dari kedua kampung ini biasanya hanya di perairan dan pulau-pulau sekitar kampung.

Potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh nelayan di sekitar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya adalah batu-batu (kakak tua), bubara (kuwe), kurisi, lalosi (ekor kuning), tenggiri, tongseng (kerapu lodi), cangkalang, gutila (lencam), bulana, famingseng (kerapu), geropa (kerapu), ikan kumis, semadar, hiu, kakap merah, lema (*Restrelliger*), sako (*Tylosurus*), kulit pasir, ikan sungut, lobster, napoleon, oci (*Restrelliger*), sikuda (*Lethrinus*), dan tato. Jenis alat tangkap yang dipergunakan untuk menangkap ikan antara lain; pancing, pancing dasar, cigi, jaring insang dan speargun. Hasil tangkapan dan jenis alat tangkap disajikan pada Tabel 3

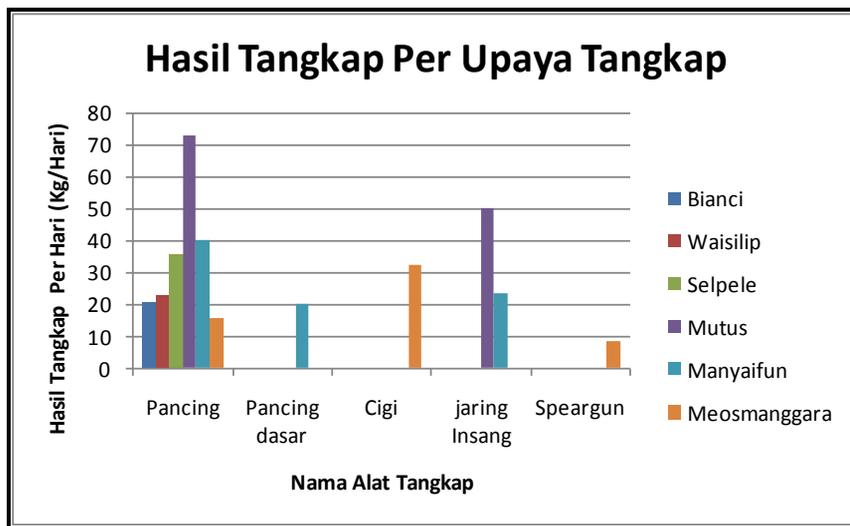
Tabel 3. Jenis Hasil Tangkapan di Sekitar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya.

No	Nama Ikan	Bianci	Waisilip	Mutus	Manya ifun	Meos manggara
1	Batu-batu (kakak tua)	+		+	+	+
2	Bubara (kuwe)	+		+	+	+
3	Kurisi	+				
4	Lalosi (ekor kuning)	+		+		

No	Nama Ikan	Bianci	Waisilip	Mutus	Manyaifun	Meos manggara
5	Tenggiri	+	+		+	+
6	Tongseng (kerapu lodi)	+	+	+		
7	Cangkalang		+	+	+	+
8	Gutila (lencam)			+	+	+
9	Bulana			+	+	
10	Famingseng (kerapu)			+		
11	Geropa (kerapu)			+	+	+
12	Ikan kumis			+		
13	Semadar			+		+
14	Hiu				+	
15	Kakap merah				+	+
16	Lema (restreliger)				+	+
17	Sako (tylosurus)				+	+
18	Kulit pasir					+
19	Ikan sungut					+
20	Lobster					+
21	Napoleon					+
22	Oci (restreliger)					+
23	Sikuda (lethrinus)					+
24	Tato.					+

Sumber: COREMAP II, 2010

Berdasarkan jenis tangkapan dan alat tangkap yang dipergunakan menunjukkan perikanan di Desa Bianci, Waisilip merupakan perikanan yang sangat tradisional karena hanya menangkap beberapa 3-6 jenis ikan dan hanya menggunakan pancing saja. Desa Meosmanggara, ManyaiFun dan Mutus merupakan desa dengan aktifitas perikanan yang cukup tinggi karena menggunakan alat tangkap yang jenisnya paling banyak dan jenis ikan yang dimanfaatkan paling tinggi. Dilihat dari hasil tangkap perupaya tangkap menunjukkan desa mutus memiliki aktifitas perikanan yang paling efektif karena hasil tangkapan per upaya tangkapannya paling tinggi.



Gambar 4. Hasil Tangkap Per Upaya Tangkap di kampung sekitar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak pertengahan 1997 mengeluarkan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 63, 64 dan 65 dan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2012 terkait retribusi pariwisata dan pembentukan tim pengelola dana non retribusi. Pembentukan peraturan tersebut didasari dengan semakin banyaknya wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung ke Raja Ampat untuk menyelam tanpa memberikan kontribusi bagi pengelolaan sumber daya laut Raja Ampat, masyarakat setempat dan pembangunan daerah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan setiap wisatawan asing yang berkunjung ke SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 600.000 berlaku selama setahun dengan diberikan pin, dan wisatawan dalam negeri sebesar Rp 250.000. Dana retribusi yang diperoleh sebesar 30% dialokasikan sebagai dana retribusi dan 70% sebagai dana non retribusi. Dana non retribusi ini dialokasikan sebesar 40% untuk dana konservasi, 40% untuk program ekonomi kreatif masyarakat dan 20% untuk administrasi pengelolaan.

Melalui promosi, pengelolaan obyek-obyek pariwisata dan wisatawan terlihat bahwa jumlah wisatawan ke SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya semakin meningkat dari pertengahan tahun 1997 sebanyak 998 orang menjadi 2.645 orang tahun 1998 dan 3.210 orang tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah wisatawan asing sebanyak 932 meningkat menjadi 6073 orang pada

tahun 2012. Sedangkan jumlah wisatawan domestic dari 66 pada tahun 2007 meningkat menjadi 1717 orang pada tahun 2012. Secara umum wisatawan asing lebih banyak yang berkunjung ke SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

Tabel 4. Jumlah kunjungan wisatawan ke SAP Kepulauan Raja Ampat

<b>Wisatawan</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
International	932	2,366	2,872	3,858	5,19	6,037	21224
Local tourists	66	279	338	652	1,266	1,717	4298

Sumber : Dinas Pariwisata Raja Ampat 2013.

Selain itu jumlah resort juga bertambah dari 2 resort tahun 1997 menjadi 6 resort tahun 1999, dan jumlah kapal pariwisata (*liveabords*) yang berkunjung dari 5 regular tahun 2007 menjadi 27 regular tahun 2010 (CI, 2010).

#### 4. Potensi Sosial Budaya

Kampung-kampung yang terdapat disekitar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat ada 5 kampung, yaitu: Manyafun, Waisilip, Bianci, Mutus dan Meosmanggara. Selain Kampung Manyafun, empat kampung lainnya terletak didalam SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Walaupun Kampung Manyafun berada diluar SAP Kepulauan Raja Ampat, namun sebagian besar masyarakatnya menangkap ikan di dalam dan di sekitar wilayah SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

##### a. Kependudukan

Secara administratif, Kampung Manyafun dan Meosmanggara berada dalam Distrik Waigeo Barat Kepulauan, yang berbatasan dengan SAP Kepulauan Raja Ampat sedangkan Kampung Waisilip, Bianci dan Mutus berada dalam Distrik Waigeo

Barat. Kampung Manyafun terletak di Pulau Manyafun dengan luas 21 ha yang dihuni 50 KK, demikian pulau dengan Kampung Meosmanggara, Mutus dan Bianci terletak di pulau dengan luas masing-masing 75 ha dan dihuni 64 KK, 75 ha dan dihuni 95 KK serta 140 ha dan dihuni 27 KK. Sedangkan Kampung Waisilip terletak di daratan besar pulau Waigeo dengan luas 25 ha dan dihuni 46 KK. Kampung ini merupakan ibukota Distrik Waigeo Barat.

Suku/etnis yang tinggal di Kampung Manyafun didominasi oleh suku Biak Beteu/Beser Raja Ampat 73.58%, di Waisilip suku Biak Betew/Beser Raja Ampat 94.28%, di Bianci didominasi 3 suku yaitu suku Kawe 30%, suku Tidore 42% dan suku Buton 26%, di Mutus suku Biak Betew/Beser Raja Ampat 91% dan di Meosmanggara suku Biak Betew/Beser Raja Ampat 94%. Setiap suku memiliki beberapa marga. Walaupun dalam satu kampung terdapat beberapa suku dengan marga-marganya, dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi secara harmonis dan dinamis diantara masyarakat. Hal ini tercermin apabila suatu suku mengadakan kegiatan, maka suku-suku yang lain akan diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Kelembagaan di kelima kampung pada umumnya sama, terdapat kelembagaan formal dan informal. Lembaga formal terdiri dari pemerintahan kampung dan badan musyawarah kampung (BAMUSKAM). Lembaga informal terdiri dari kelompok nelayan, kelompok keagamaan dan kelompok jemaah masjid. Di beberapa kampung terdapat Lembaga Pengelola Sumber daya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yg pembentukannya difasilitasi oleh Coremap II Raja Ampat (Amrulla, 2010).

#### b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*"

## B. Permasalahan Pengelolaan

Beberapa permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat diidentifikasi dari hasil-hasil pertemuan dan konsultasi publik dengan stakeholder dilapangan maupun dari hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Kebijakan pembangunan Kabupaten Raja Ampat yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.

Sebagai sebuah kabupaten baru dibentuk pada tahun 2004, Kabupaten Raja Ampat memerlukan serangkaian pembangunan untuk pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan harus didasari dengan karakteristik Raja Ampat sebagai kabupaten kepulauan dengan potensi utama sumber daya pesisir dan laut, dan sifat pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian Program Bersama CI, TNC dan WWF (2009) diketahui sejumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat yang telah menyebabkan degradasi lingkungan yaitu:

- Pembangunan jalan di wilayah pesisir dari Waisai ke Wawiyai;
- Penambangan nikel dengan metode pengelupasan lapisan;
- Pembabatan hutan dan pembukaan lahan daratan tanpa tujuan spesifik;
- Pengembangan lahan pertanian di kawasan pesisir.

Dampak dari kegiatan-kegiatan diatas adalah terjadinya sedimentasi di sungai dan laut akibat terbukanya lahan. Pulau-pulau di Raja Ampat pada umumnya berbentuk perbukitan curam dengan garis pantai yang pendek dan curah hujan yang tinggi. Pembukaan lahan menyebabkan tinggi aliran air dari daratan ke sungai atau laut karena sedikitnya kesempatan untuk tersaring lewat rawa atau penyangga lainnya. Akibat sedimentasi terjadi pencemaran terhadap padang lamun, terumbu karang dan teluk-teluk kecil berpasir yang dangkal. Dampak lainnya adalah terjadinya pengayaan unsur hara di perairan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan terumbu karang untuk pertumbuhannya. Kedua hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan yang tergantung pada terumbu karang dan juga menurunkan potensi wisata akibat keruhnya air dan rusaknya terumbu karang.

2. Terumbu karang mati akibat bukaan lahan dan pembangunan jalan sedimentasi

Pemerintah Raja Ampat merencanakan pembangunan jalan di wilayah pesisir dengan menghubungkan desa-desa di Kepulauan Waigeo dan di tiga pulau besar lainnya. Pembukaan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan juga mulai banyak dilakukan disekitar desa seperti Kampung Waisilip (Amrulla dkk, 2010). Dikhawatirkan hal ini dapat mengakibatkan terjadinya sedimentasi perairan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat.

3. Belum ada lembaga pengelola kawasan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilapangan yang secara rutin melakukan pengelolaan.

Sebagai sebuah KKP yang baru diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2009, dari status Suaka Margasatwa Laut dibawah pengelolaan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam) Provinsi Papua Barat menjadi SAP dibawah pengelolaan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) yang terletak di Kupang, dapat dipahami apabila keberadaan lembaga pengelola kedua SAP dilapangan setingkat UPT belum ada. Hal ini dikarenakan birokrasi dalam pembentukan sebuah lembaga baru dalam sistem pemerintahan yang tidak memungkinkan dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian mengingat lokasi BKKPN Kupang yang jauh dan pentingnya kedua SAP untuk segera dikelola secara efektif dan efisien, maka keberadaan lembaga pengelola setingkat UPT di Raja Ampat sangat penting untuk dibentuk guna mewujudkan pengelolaan kedua SAP yang lebih baik.

Sampai saat ini lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola adalah BKKPN Kupang. Selanjutnya, BKKPN menunjuk beberapa stafnya untuk diberi tanggung jawab untuk memulai pengelolaan SAP ini. Sehingga, sampai saat ini belum ada kelembagaan khusus setingkat UPT yang dibentuk untuk mengelola kedua SAP tersebut. Selain itu, berdasarkan FGD dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, mereka menyatakan kesediaannya untuk ikut terlibat dalam mengelola kedua kawasan tersebut. Hal ini juga terkait dengan kerangka kerja jejaring KKP di Raja Ampat. Selain dua SAP, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat saat ini sedang mengembangkan

pengelolaan beberapa kawasan konservasi perairan yang dicadangkan melalui Peraturan Bupati.

4. Kerusakan terumbu karang akibat praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan potasium sianida masih merupakan persoalan yang terjadi dimana-mana. Kerusakan terumbu karang dan habitat lainnya akibat kegiatan ini sangat besar, sedangkan daya pulih ekosistem tersebut tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi.

Berdasarkan survei dan diskusi yang dilakukan bersama masyarakat dan stakeholders terkait, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini masih sering terjadi di Raja Ampat baik dilakukan oleh nelayan setempat ataupun oleh nelayan dari luar daerah. Setelah adanya program pendidikan dan penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum, program ini cukup efektif untuk mengurangi kejadian-kejadian pelanggaran penggunaan bom dan potasium sianida. Namun hingga kini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan terutama oleh nelayan luar daerah.

5. Penangkapan ikan secara berlebihan oleh nelayan luar Raja Ampat

Selain alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, masyarakat setempat juga mengeluhkan beroperasinya alat tangkap modern yang dapat berdampak terhadap penangkapan ikan yang berlebih. Nelayan luar daerah yang menggunakan alat lebih canggih dan dengan kapasitas kapal yang jauh lebih besar mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan nelayan lokal. Nelayan luar diperkirakan mengeksploitasi 70% sumber daya ikan yang ada di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

6. Pemahaman terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan di tingkat masyarakat menyebabkan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya pesisir relatif masih rendah. Selain itu kurangnya kapasitas pemerintah juga menyebabkan program peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan relatif lambat

7. Kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan SAP maupun pengawasan kawasan

SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat ini relatif masih baru. Penempatan staf BKKPN di Waisai, Ibukota Raja Ampat, dirasa belum efektif karena tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. BKKPN Kupang diharapkan dapat menjadi pengelola atau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan cikal bakal lembaga pengelola kawasan konservasi ini. Namun demikian, saat ini BKKPN Kupang masih dalam tahap pengembangan kelembagaan, sedangkan kawasan konservasi yang diserahkan oleh pemerintah kepada BKKPN Kupang ini relatif banyak. Sehingga dengan daya dukung sumber daya manusia belum mencukupi dan kurangnya dana yang tersedia, menyebabkan staf yang ada dilapangan belum efektif melakukan tugasnya.

### BAB III

#### PENATAAN ZONASI

##### A. Umum

Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dapat dilakukan melalui 3 prinsip pendekatan (DKP, 2007). Ketiga pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pasal 61-68). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang menekankan perlunya pengelolaan perikanan, karena sumber daya ikan tidak tanpa batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang paling tua terdiri dari pengaturan dan pengelolaan kegiatan individual di sektor kelautan, seperti perikanan tangkap komersial yang dilakukan oleh satu lembaga pemerintah, dengan berbagai tindakan koordinasi dengan berbagai lembaga lain. Biasanya, tingkatan koordinasi yang terjadi sangat lemah atau bahkan tidak ada dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (Kelleher and Kenchinton, 1991).

KKP yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku melalui keputusan menteri, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembagian zonasi, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola kawasan tersebut. Proses zonasi hendaknya didasarkan pada kajian ilmiah dan mengakomodasi prinsip-prinsip yang telah diakui oleh para ahli. Kriteria yang dipakai dalam proses zonasi diantaranya meliputi:

1. Adanya keterwakilan ekosistem dan ulangan habitat yang dikonservasi;
2. Ukuran yang tidak terlalu kecil;
3. Persentasi habitat penting yang dilindungi mencapai sekitar 30%;
4. Pemilihan lokasi yang masih virgin atau dalam kondisi sangat baik;
5. Secara sosial ekonomi, sejauh mungkin zona inti berada jauh dari pusat permukiman penduduk (modifikasi dari Mouse, 2007).

Beberapa tahapan kegiatan dan studi dilakukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan review zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Pengumpulan data dan review zonasi
- b. Analisis data

- c. Penyusunan draft Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi SAP Raja Ampat
- d. Konsultasi Publik 1
- e. Perbaikan draft Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi SAP Raja Ampat
- f. Konsultasi Publik 2
- g. Finalisasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi SAP Raja Ampat.

#### 1. Proses Penataan Zonasi

Proses penataan zonasi merupakan tahapan awal yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses pengembangan kawasan, pemanfaatan dan system pengelolaan yang efektif. Salah satu kebutuhan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya yang cukup mendasar adalah penataan zonasi dengan mempertimbangkan ekosistem dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menjalankan fungsi kawasan pelestarian alam dan didukung secara penuh oleh semua pihak (*stakeholder*).

Proses menuju pengelolaan yang efektif dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang tidak bisa dipisahkan. Langkah-langkah koordinasi lintas sektor dan koordinasi teknis perlu secara rinci diidentifikasi dan dijalankan sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor. Harapan kedepan adalah partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk mendukung manajemen kawasan konservasi perairan sehingga dapat mengemban fungsinya dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Keterpaduan langkah dari seluruh pihak diharapkan mampu mempertajam aspek-aspek penataan zonasi (biofisik, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan, rencana pembangunan daerah).

##### a. Identifikasi Isu

Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu dan masalah yang ada dan mungkin timbul yang berkaitan dengan keberadaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, kelembagaan, masyarakat dan pemanfaatan perikanan.

## b. Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data antara lain dengan menggunakan kuesioner, semistructure-interview dan *focus group discussion* (FGD). Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan data primer dari SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya. Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Data mengenai identifikasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya dan berupa data tabular dan data spasial yang mencakup:
  - Kajian zonasi yang telah dibuat
  - Data kondisi biofisik, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya
2. Parameter biofisik dan ekologi antara lain :
  - Iklim (angin, musim, curah hujan, dan lain-lain)
  - hidrooseanografi (kualitas air, pasang surut, arus, gelombang, dan lain-lain).
  - biota perairan (plankton, terumbu karang, ikan karang, rumput laut, padang lamun, dan mangrove).
3. Parameter sosial, budaya, dan ekonomi antara lain :
  - Jumlah dan kepadatan penduduk,
  - Tingkat pendidikan,
  - Kesehatan masyarakat,
  - Kelembagaan masyarakat,
  - Etnik, seni dan budaya lokal,
  - Sarana dan prasarana daerah,
  - Mata pencaharian dan tingkat pendapatan.
  - Pengelolaan sumberdaya alam
  - Pola pemanfaatan sumberdaya alam
4. Parameter pengelolaan SAP antara lain :
  - Parameter kelemahan, kekuatan , peluang dan ancaman pada pengelolaan SAP Raja Ampat
  - Rekomendasi strategi pengelolaan

## c. Proses Penyusunan Zonasi

Proses penyusunan zonasi SAP Raja Ampat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1) Analisis data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi

masing-masing parameter data. Kondisi masing-masing parameter data tersebut selanjutnya menjadi input pada proses pemilihan zona dalam SAP Raja Ampat.

Proses pemilihan zona atau rencana zonasi pada SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat pada tahap analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MARXAN dan teknik tumpang susun (overlay). Kedua perangkat lunak tersebut sifatnya hanya untuk membantu pengambilan keputusan (decision support system) untuk memilih beberapa lokasi yang akan menjadi zona inti di dalam kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Hasil utama dari analisis MARXAN berupa identifikasi daerah-daerah dengan nilai konservasi yang tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang rendah. Dengan demikian parameter masukan dalam analisis ini adalah nilai penting suatu kawasan dan beban biaya pengelolaan. Nilai penting kawasan diperoleh dari kriteria-kriteria biofisik dan social yang juga merupakan kriteria zona inti dalam SAP Raja Ampat, sementara beban biaya adalah pengaruh negative aktivitas social masyarakat terhadap konservasi, dimana semakin tinggi pengaruh negative suatu aktivitas semakin tinggi pula angka yang diberikan, dan sebaliknya.

## 2) Proses Partisipatif

Proses ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi serta mencari masukan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Wujud dari proses ini berupa konsultasi public dan/atau pertemuan-pertemuan di tingkat komunitas, dengan materi masukan adalah hasil analisis rencana zonasi yang telah dilakukan sebelumnya.

## 2. Desain Zonasi

Desain untuk rencana zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat berdasarkan pada analisis dari data yang telah tersedia sesuai dengan pedoman dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010, tujuan dan kriteria desain (biofisik, resilien, dan

sosial ekonomi) untuk SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Metode yang dipakai dalam kajian zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat adalah Analisis Marxan. Analisis Marxan merupakan pemodelan spasial ekosistem dengan basis sistem informasi geografis (Geselbracht *et al.*, 2005 serta Barmawi dan Darmawan, 2007). Langkah-langkah dalam Analisis Marxan adalah:

- 1) Menentukan parameter ekologi yang akan dijadikan target spasial dan parameter yang akan dijadikan sebagai biaya. Parameter biaya yang dimaksud adalah parameter yang dianggap sebagai parameter yang memberikan dampak negatif bagi kegiatan konservasi laut.
- 2) Membuat *Area of Interest* (AOI). AOI merupakan batas terluar kawasan yang akan dikaji.
- 3) Membuat satuan perencanaan dalam bentuk heksagonal di dalam AOI. Luas masing – masing satuan perencanaan adalah 1 – 10 hektar.
- 4) Memasukan parameter – parameter target dan biaya ke dalam satuan perencanaan.
- 5) Membuat konfigurasi *file* pendukung dari parameter yang telah dimasukkan dalam satuan perencanaan.
- 6) Membuat berbagai macam skenario untuk memilih area prioritas.
- 7) Mensimulasikan skenario untuk menentukan satuan perencanaan terpilih sebagai area prioritas. Area prioritas yang terpilih merupakan area prioritas dengan skenario yang sesuai dan nilai total biaya terendah. Nilai total biaya dihitung dengan rumus (Huggins, 2006):

$$TB = BSP + BKK + PKA$$

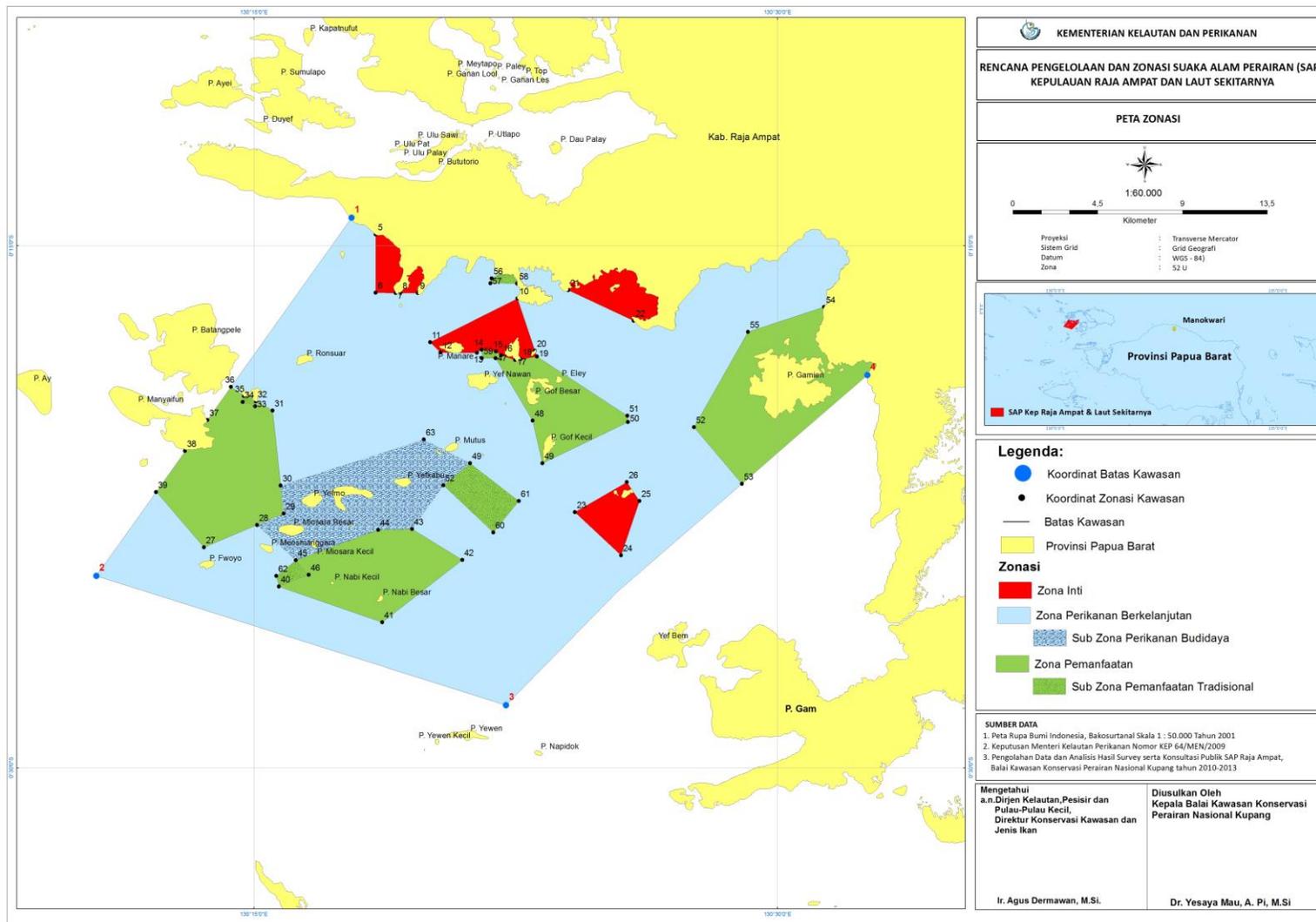
TB : Total biaya,

BSP : Biaya satuan perencanaan yang dikeluarkan,

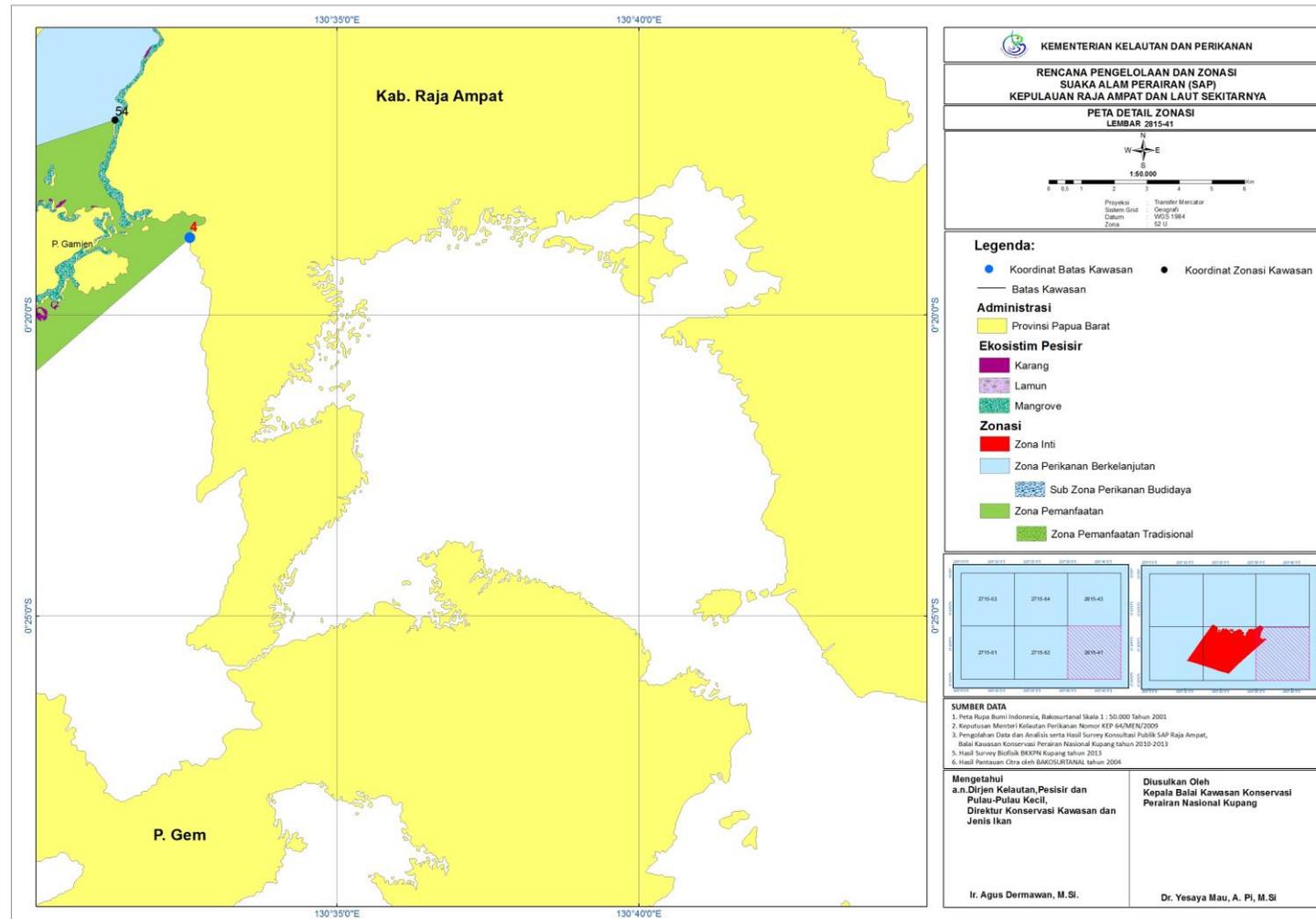
BKK : Biaya kegiatan berdampak negatif terhadap konservasi,

PKA : Panjang keliling area.

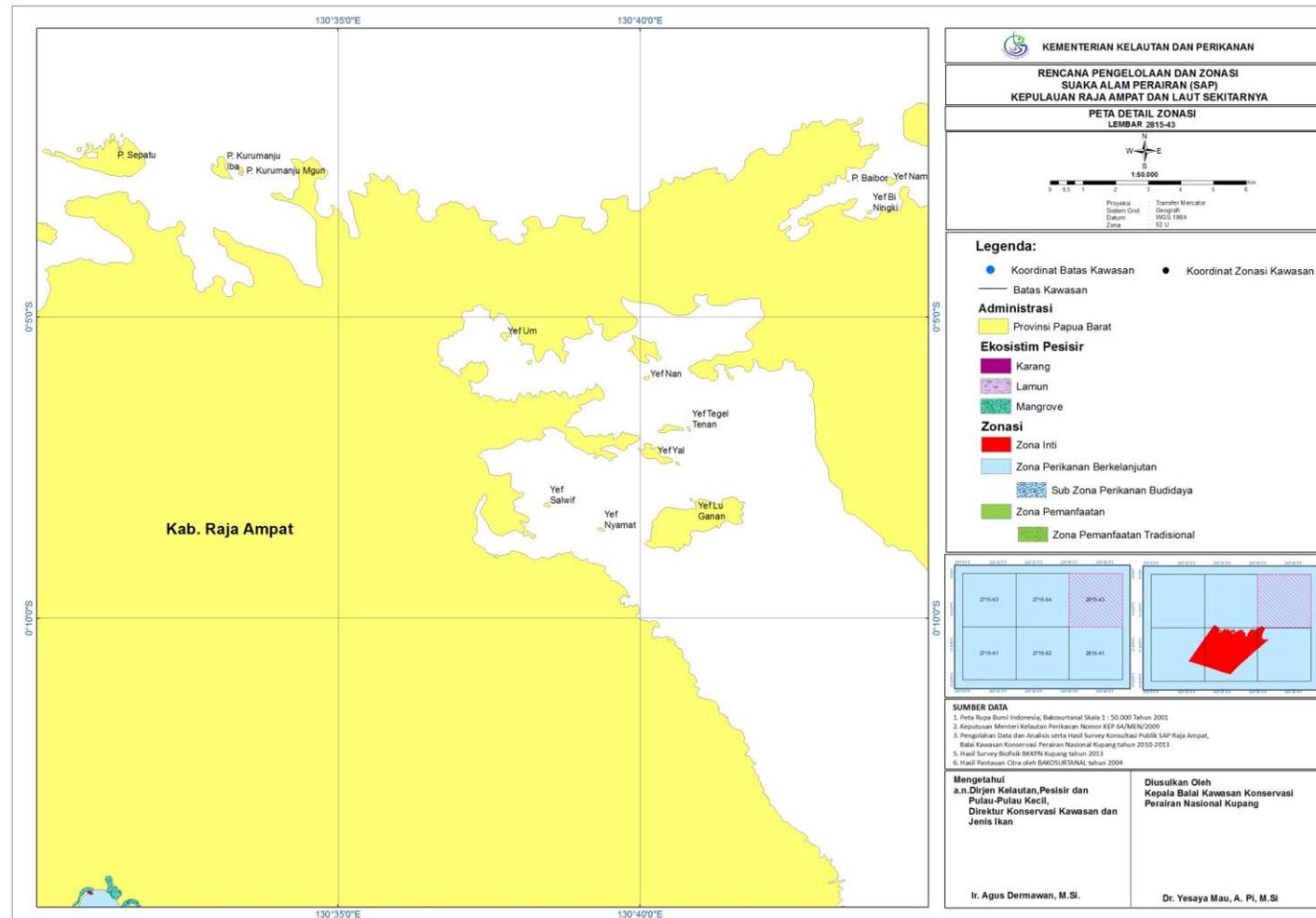
Peta zonasi SAP Raja Ampat dan Laut Sekitarnya dibuat dengan ukuran 1 : 60.000, yang dapat dilihat pada gambar 5, dan peta detail zonasi SAP Raja Ampat dan Laut Sekitarnya dengan ukuran 1;50.000 yang dapat dilihat pada gambar 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 dibawah ini.



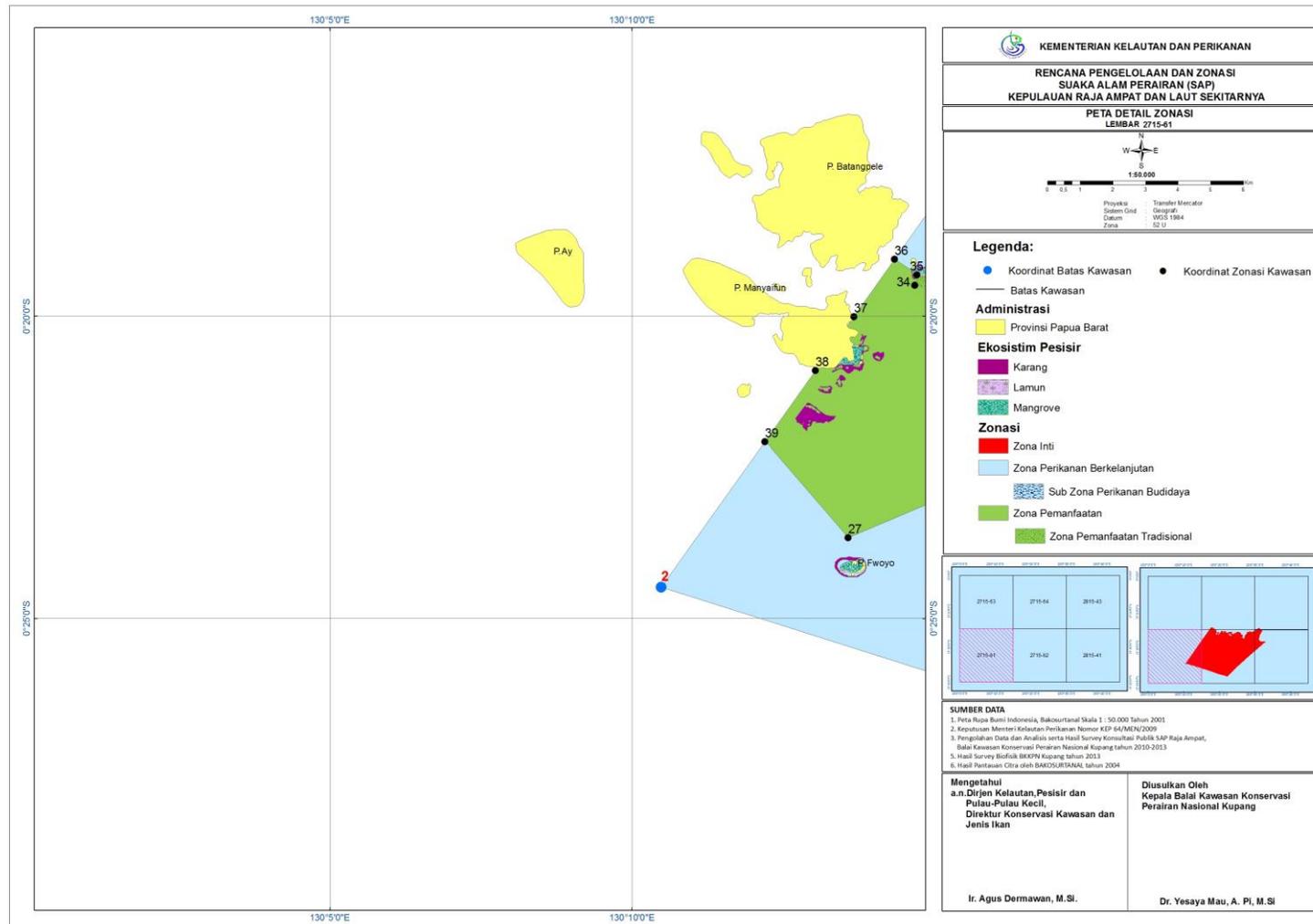
Gambar 5. Peta Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



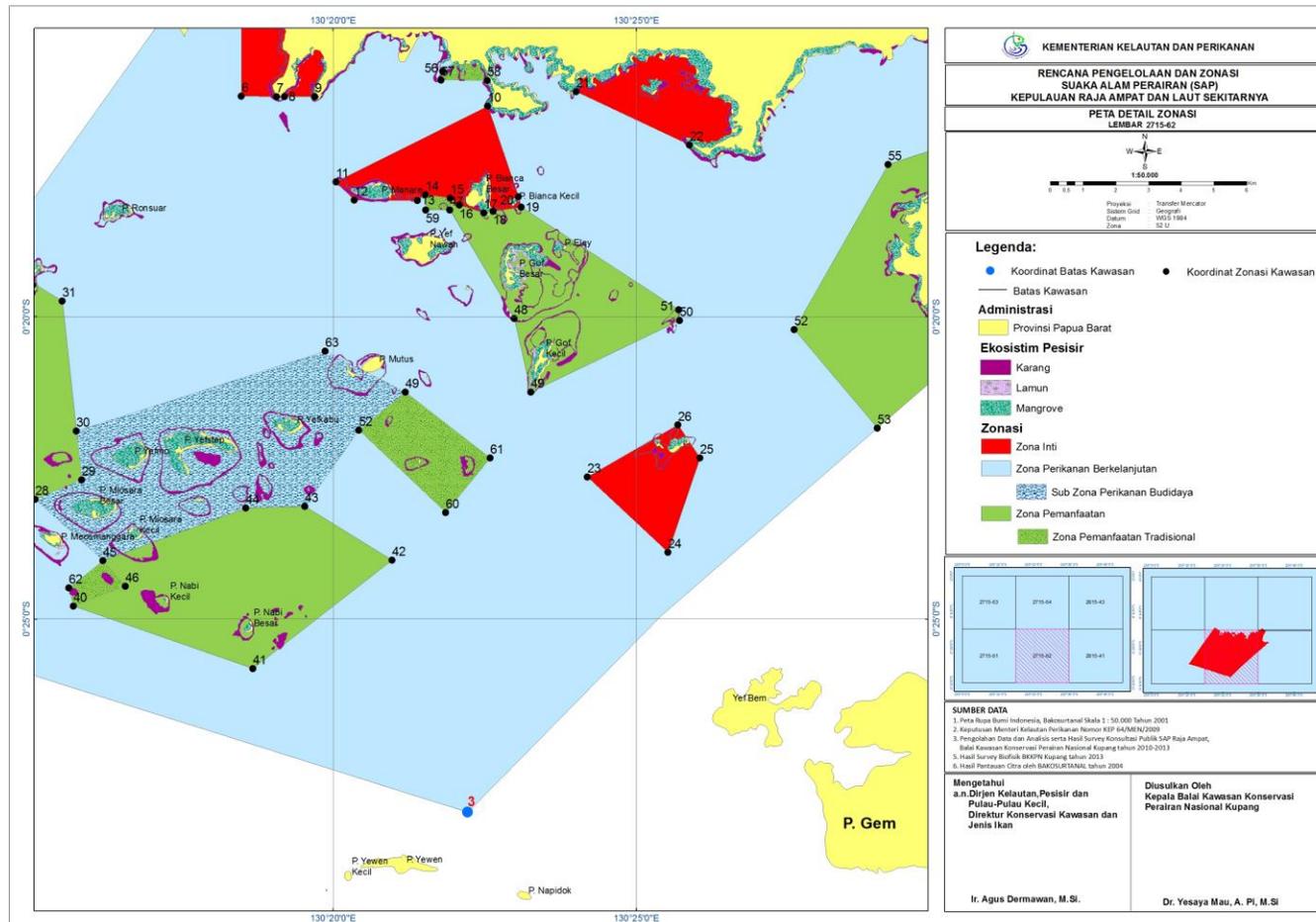
Gambar 6. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



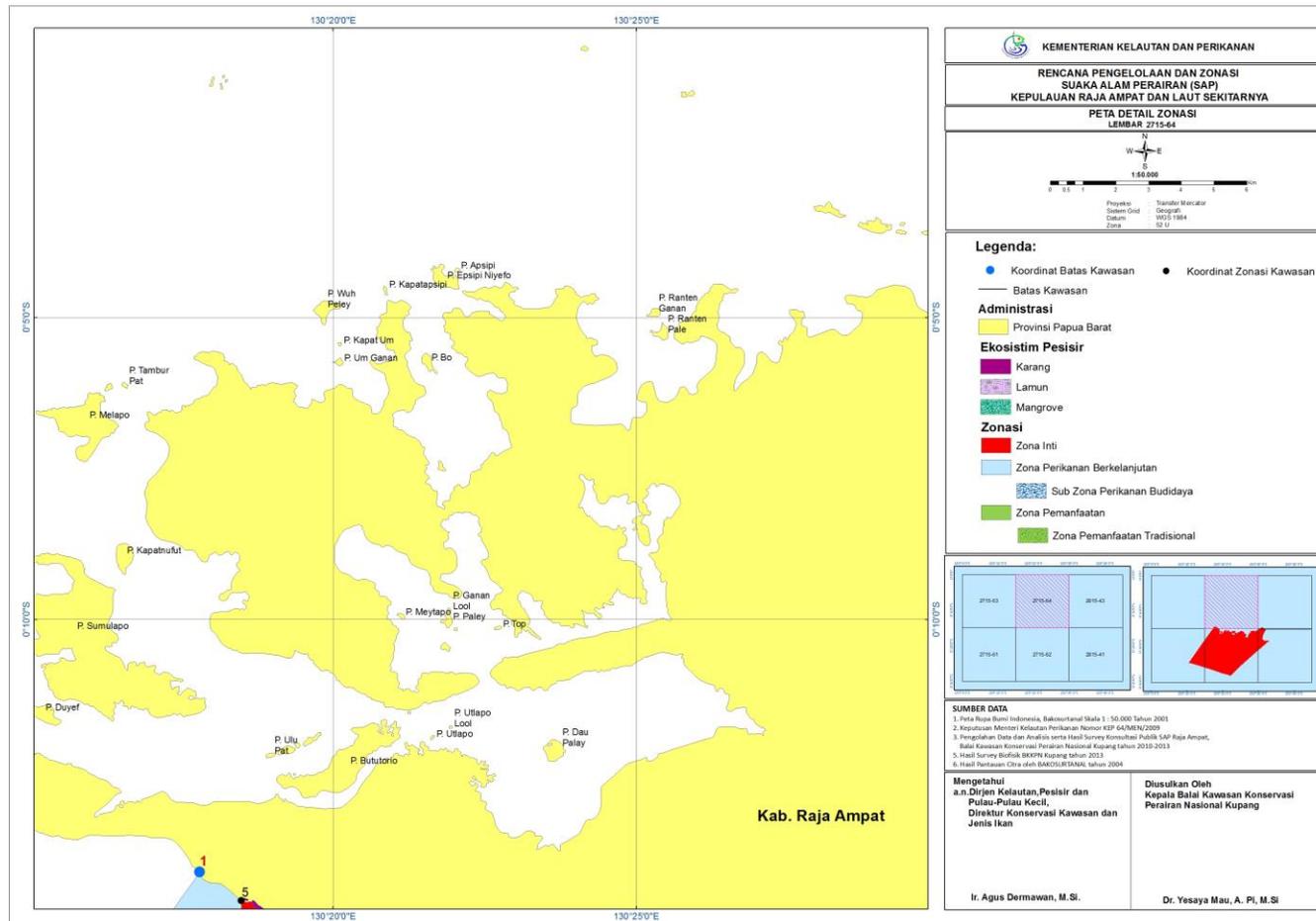
Gambar 6.1. Peta Detail SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Gambar 6.2. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Gambar 6.3. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Gambar 6.4. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

## B. Zona inti

### 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona inti merupakan wilayah kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi habitat yang baik dan mempunyai luas minimal 2% dari luas kawasan, dengan kriteria antara lain:

- a. Merupakan daerah pengasuhan ikan;
- b. Memiliki keragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- c. Mewakili keberadaan habitat dan biota asosiasinya;
- d. Memiliki keterwakilan ekosistem penting; dan
- e. Memiliki luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup berbagai jenis biota untuk menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami.

Keberadaan potensi sumberdaya diantaranya terumbu karang, mangrove dan penyu hijau. Ketiga potensi sumberdaya tersebut mulai mengalami kerusakan, hal tersebut menjadikan dasar pertimbangan penentuan zona inti. Didasarkan pada kriteria zona inti, survey biofisik dan konsultasi publik maka zona inti SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat terdiri dari 4 wilayah, yaitu (1) daerah yang terletak di perairan antara Tanjung Manare dan tanjung sebelah timur Tanjung Manare serta perairan sebelah barat Tanjung Manare; (2) wilayah perairan antara Tanjung Waisai dan tanjung sebelah barat Tanjung Waisai; (3) perairan sekitar Pulau Bianci Kecil; dan (4) perairan sekitar Pulau Peniki. Luas zona inti di SAP Raja Ampat mencapai 2.794 ha atau sekitar 4,66% dari luas total kawasan. Zona inti SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Untuk mengetahui titik-titik koordinat dari masing-masing zona inti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tabel Zonasi, Nomor Koordinat, Lokasi, Koordinat, Luas dan Persentase Zona Inti SAP Raja Ampat

Lokasi	No. Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Selatan)	
Perairan tanjung Manare	5	130° 18' 29.30" BT	0° 14' 40.13" LS	444
	6	130° 18' 29.30" BT	0° 16' 20.92" LS	
	7	130° 19' 03.88" BT	0° 16' 21.13" LS	
	8	130° 19' 11.70" BT	0° 16' 21.16" LS	
	9	130° 19' 41.83" BT	0° 16' 21.33" LS	

Lokasi	No. Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Selatan)	
Perairan Tanjung Waisai	10	130° 22' 32.70" BT	0° 16' 30.70" LS	962
	11	130° 20' 02.70" BT	0° 17' 46.08" LS	
	12	130° 20' 20.90" BT	0° 18' 04.07" LS	
	13	130° 21' 23.22" BT	0° 18' 04.28" LS	
	14	130° 21' 31.00" BT	0° 17' 58.81" LS	
	15	130° 21' 55.99" BT	0° 18' 01.93" LS	
	16	130° 22' 04.98" BT	0° 18' 09.00" LS	
	17	130° 22' 29.18" BT	0° 18' 16.71" LS	
	18	130° 22' 38.17" BT	0° 18' 15.21" LS	
	19	130° 23' 06.23" BT	0° 18' 10.92" LS	
	20	130° 23' 03.23" BT	0° 18' 00.86" LS	
Perairan P. Bianci Kecil	21	130° 24' 00.25" BT	0° 16' 16.24" LS	729
	22	130° 25' 52.78" BT	0° 17' 09.20" LS	
Perairan P. Peniki	23	130° 24' 11.46" BT	0° 22' 38.98" LS	659
	24	130° 25' 31.24" BT	0° 23' 53.88" LS	
	25	130° 26' 02.72" BT	0° 22' 19.98" LS	
	26	130° 25' 41.01" BT	0° 21' 47.42" LS	

## 2. Potensi

Di dalam 4 wilayah zona inti tersebut terdapat sekitar 14,5% habitat terumbu karang yang dilindungi atau mencapai luasan 212 ha. Untuk potensi dari masing-masing Zona Inti dijelaskan dalam table di bawah ini.

Tabel 6. Tabel Id Zona, Zona, Sub Zona dan Potensi masing-masing Zona Inti SAP Raja Ampat

Lokasi	Potensi
Perairan tanjung Manare	Tutupan Terumbu karang rata-rata 30% dengan maksimal tutupan karang mencapai 50%, terdapat ekosistem mangrove, serta berpotensi sebagai <i>feeding ground</i> Penyu Hijau.
Perairan Tanjung Waisai	Tutupan Terumbu karang rata-rata 24% dengan maksimal tutupan karang mencapai 55%, terdapat ekosistem mangrove, serta berpotensi sebagai habitat <i>Bumphead Parrot Fish</i> .
Perairan P. Bianci Kecil	Tutupan Terumbu karang rata-rata 14% dengan maksimal tutupan karang mencapai 40%, terdapat ekosistem mangrove, serta berpotensi sebagai habitat <i>Bumphead Parrot Fish</i> .
Perairan P. Peniki	Tutupan Terumbu karang rata-rata 15% dengan maksimal tutupan karang mencapai 30%, terdapat ekosistem mangrove, serta berpotensi sebagai habitat Hiu Karang,

### 3. Peruntukan / Tujuan Zona

Zona inti dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta penelitian dan pendidikan. Zona inti yang terdapat di kawasan konservasi perairan nasional SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat memiliki potensi dan keterwakilan ekosistem penting seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun.

Zona Inti SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat adalah kawasan yang hanya diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta penelitian dan pendidikan.

- a. Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan meliputi: perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya; penjagaan, pengawasan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan.
  - b. Kegiatan penelitian yang diperbolehkan yaitu: penelitian dasar menggunakan metode naturalistik untuk tujuan pengumpulan data dasar kondisi biologis dan ekologis; penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologis dan ekologis.
  - c. Kegiatan pendidikan diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam
- ### 4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan

Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan zona inti adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada zona inti

<b>Perumusan Kegiatan</b>	<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
Kegiatan yang diperbolehkan	1	Patroli pengawasan
	2	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty)
Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin	1	Monitoring dan Penelitian non ekstraktif
	2	Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, mangrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan

		sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Monitoring dan Penelitian ekstraktif
	2	Tambatan perahu
	3	Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya
	4	Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen)
	5	Pembangunan Rumah Adat
	6	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor)
	7	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)
	8	Rekreasi pantai
	9	Wisata menyelam
	10	Wisata snorkeling
	11	Wisata Jet Ski
	12	Wisata Kayak/Dayung
	13	Wisata Surfing
	14	Wisata Kite surfing
	15	Wisata Mancing (Catch and Release)
	16	Wisata perahu kaca (glass boat)
	17	Perahu wisata
	18	Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba
	19	Wisata melihat burung
	20	Wisata mangrove
	21	Wisata Budaya
	22	Wisata tracking
	23	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
	24	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	25	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored))
	26	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets)
	27	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik
	28	Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net)

29	Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net)
30	Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net)
31	Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net)
32	Penangkapan Ikan dengan Bubu
33	Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur
34	Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda
35	Penangkapan Ikan dengan Pancing layang-layang
36	Penangkapan Ikan dengan Sero
37	Penangkapan Ikan dengan Jermal
38	Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna
39	Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut
40	Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap
41	Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut
42	Penangkapan Ikan dengan Huhate
43	Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang)
44	Pemasangan Rumpon
45	Rumpon telur ikan terbang
46	Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom
47	Menangkap Ikan Hias
48	Menangkap ikan dengan senapan dan tombak
49	Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan
50	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas
51	Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal
52	Lampara dasar
53	Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
54	Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
55	Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll)
56	Mengambil dan menjual telur penyu

57	Budidaya Rumput Laut
58	Budidaya Mutiara
59	Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA)
60	Budidaya Teripang
61	Budidaya Lobster
62	Membangun Tambak
63	Alur Kapal untuk perhubungan
64	Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan
65	ALKI III
66	Penebangan Mangrove
67	Pengambilan Karang hidup atau mati
68	Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan lokal Sabu Rajua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat.
69	Penambangan Pasir Laut
70	Survey Seismic Minyak dan Gas
71	Penambangan Minyak dan Gas
72	Pembuangan Limbah dan Sampah

### C. Zona Perikanan Berkelanjutan

#### 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zonasi Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria dari Zona Perikanan Berkelanjutan antara lain:

- a. Memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- b. Mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
- c. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;
- d. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan

- e. Mempunyai keanekaragaman jenis dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomis.

Zona perikanan berkelanjutan mencapai luas sekitar 44.351,39 Ha atau 73,91% dari total luas SAP. Di dalam zona ini termasuk didalamnya adalah alur pelayaran.

#### 1.1 Sub zona Perikanan Budidaya

Sub zona perikanan budidaya hanya terbatas bagi kegiatan budidaya keramba jaring apung dan budidaya rumput laut yang dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam dan sekitar SAP, yang mencapai luasan 3.652 ha (6,09%).

Untuk titik koordinat dari zona perikanan berkelanjutan dan Sub zona Perikanan Budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Tabel Zonasi, Nomor Koordinat, Lokasi, Koordinat dan Luas Zona Perikanan Berkelanjutan dan Sub zona Perikanan Budidaya SAP Raja Ampat

Lokasi	No. Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Selatan)	
Zona Perikanan Berkelanjutan				
Di seluruh perairan SAP Raja Ampat, di luar zona inti dan zona pemanfaatan	1	130° 17' 47.83" BT	0° 14' 11.48" LS	40.233
	2	130° 10' 29.00" BT	0° 24' 29.00" LS	
	3	130° 22' 13.08" BT	0° 28' 12.00" LS	
	4	130° 32' 34.09" BT	0° 18' 42.94" LS	
Sub zona Perikanan Budidaya				
Di perairan kampung Meos manggara	43	130° 19' 31.83" BT	0° 23' 08.13" LS	3.652
	49	130° 21' 11.41" BT	0° 21' 14.63" LS	
	53	130° 28' 58.53" BT	0° 21' 50.42" LS	
	63	130° 19' 52.17" BT	0° 20' 33.94" LS	
	43	130° 19' 31.83" BT	0° 23' 08.13" LS	

## 2. Potensi

Untuk potensi dari Zona Perikanan Berkelanjutan dan Sub zona Perikanan Budidaya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Tabel Potensi Zona Perikanan Berkelanjutan dan Sub zona Perikanan Budidaya SAP Raja Ampat

<b>Zona/Sub Zona</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Potensi</b>
Zona Perikanan Berkelanjutan	Di seluruh perairan SAP Raja Ampat, di luar zona inti dan zona pemanfaatan	Tutupan Terumbu karang rata-rata 26% dengan maksimal tutupan karang mencapai 70%, berpotensi sebagai habitat Lobster, potensi <i>Bumphead Parrot Fish</i> , potensi <i>feeding ground</i> Penyu Hijau, berpotensi besar perikanan cumi dan ikan teri " <i>puri</i> ", berpotensi terdapat napoleon
Sub zona Perikanan Budidaya	Di perairan kampung Meosmanggara	Tutupan Terumbu karang rata-rata 30% dengan maksimal tutupan karang mencapai 70%, Potensi ikan kerapu, terdapat <i>schooling</i> ikan kakap, potensi <i>feeding ground</i> Penyu Sisik

### 3. Peruntukan/Tujuan Zona

Zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.

Zona Perikanan Berkelanjutan diperuntukkan untuk perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan pendidikan, kearifan lokal/adat istiadat dan alur pelayaran.

### 4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan

Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan zona perikanan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di zona perikanan berkelanjutan

<b>Perumusan Kegiatan</b>	<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
Kegiatan yang boleh	1	Wisata Menyelam
	2	Wisata Speargun/Memanah Ikan
	3	Wisata watersport - Windsurf - Surfing - Wisata watersport lainnya
	4	Wisata Perahu Kaca (Glass Bottom Boat)
	5	Berlayar melintas
	6	Tambatan kapal (Muoring buoy)
	7	Upacara adat, ritual keagamaan
	8	Menyelam untuk mengambil biota
	9	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	10	Budidaya rumput laut,
	11	Keramba jaring apung,
	12	Budidaya bibit kerapu alami
	13	Aktifitas Penangkapan Ikan: - Pancing - Jaring Atas - Panah/Speargun - Rawai Dasar - Pancing cumi pada malam hari (tidak buang jangkar)
Kegiatan yang boleh tetapi dengan izin	1	Pemasangan Rumpon
	2	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
	3	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan
	4	Membangun sarana dan prasarana terbatas untuk menunjang kegiatan budidaya - kapal layar cruise, kapal selam - penenggelaman kapal (ship wreck)
Kegiatan yang boleh tetapi dengan izin	4	Penelitian
	5	Pendidikan, Pemeliharaan, Pemulihan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Ekosistemnya

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
	6	Budidaya
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Berenang dan Snorkling
	2	Wisata watersport - Jetsky - Banana Boat
	3	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan - marine walk
	4	Berlabuh (Kapasitas kapal <10 GT)
	5	Berlabuh (Kapasitas Kapal >10 GT)
	6	Pengambilan karang hidup atau mati
	7	Aktifitas Penangkapan Ikan: - Mengambil biota/angsat (gleaning) - Jaring terinjang (gill net) - Jaring Mogong - Jaring Trawl, Jaring Muro ami, Huhate (pole & line), Payang, Bubu, Akar Tuba, Sianida, Bom/Bahan Peledak dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan lainnya
	8	Penangkapan ikan dengan menggunakan kompressor
	9	Mengambil, mengganggu, dan memindahkan biota baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati

#### D. Zona Pemanfaatan

##### 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona Pemanfaatan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Zona pemanfaatan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik;
- b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian jenis dan daya tarik pariwisata bahari dan rekreasi;
- c. Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi;

- d. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.

Zona pemanfaatan dalam SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat meliputi luas 12.850,15 ha atau 21,42% dari total area. Zona pemanfaatan ini dibagi menjadi sub zona pemanfaatan masyarakat. Di dalam zonasi pemanfaatan dan sub zona pemanfaatan masyarakat tersebut masing-masing melindungi 29,4% (437 ha) dan 5,4% (80 ha) dari luasan total terumbu karang yang terdapat dalam SAP tersebut.

Zona pemanfaatan merupakan zona pemanfaatan secara umum yang diperuntukan bagi kegiatan wisata dan rekreasi yang mencakup area seluas 10.138 ha (18,2%). Zona pemanfaatan wisata meliputi empat wilayah, yaitu (1) perairan sekitar Pulau Gof Besar dan pulau Gof kecil dan berbatasan dengan zona inti di Pulau Bianci Kecil di sisi sebelah selatan; (2) perairan sebelah selatan Pulau Miosarar Kecil; (3) perairan sebelah tenggara Pulau ManyaiFun sampai sebelah barat perairan Pulau Miosarar Besar; dan (4) perairan sebelah timur Teluk Waisai.

#### 1.1 Sub Zona Pemanfaatan Tradisional

Sub Zona Pemanfaatan Tradisional merupakan zona pemanfaatan yang sudah diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat setempat dalam bentuk Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang meliputi wilayah seluas 972 ha (1,7%).

Sub Zona Pemanfaatan Tradisional atau lokasi DPL meliputi (1) DPL Kampung Waisilip; (2) DPL Kampung Bianci; (3) DPL Kampung Mutus; (4) DPL Kampung Meosmanggara; dan (5) DPL Kampung ManyaiFun di bagian Selatan Pulau Tamagui.

Berdasarkan konsultasi publik dengan *stakeholders* di Raja Ampat, Daerah Perlindungan Laut (DPL) masyarakat yang dikembangkan dengan dukungan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP II) dimasukkan dalam zona pemanfaatan. DPL masyarakat tidak dimasukkan dalam zona inti karena masyarakat sebagian besar telah membuat aturan bahwa diperbolehkan melakukan penyelaman wisata di dalam DPL masyarakat. Namun demikian, DPL-DPL ini diharapkan dapat dijadikan sebagai zona pemanfaatan khusus yang dikelola oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa tanggungjawab

terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang ada di sekitarnya.

Untuk titik koordinat dari Zona Pemanfaatan dan Sub Zona Pemanfaatan Tradisional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Tabel Id Zona, Nomor Koordinat, Lokasi, Koordinat dan Luas Zona Pemanfaatan dan Sub Zona Pemanfaatan Tradisional SAP Raja Ampat

Lokasi	No. Titik Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Selatan)	
<b>Zona Pemanfaatan</b>				
Perairan Kampung ManyaiFun	27	130° 13' 34.20" BT	0° 23' 39.72" LS	3.503
	28	130° 15' 05.30" BT	0° 23' 01.28" LS	
	29	130° 15' 51.25" BT	0° 22' 41.89" LS	
	30	130° 15' 46.00" BT	0° 21' 53.45" LS	
	31	130° 15' 31.98" BT	0° 19' 44.15" LS	
	32	130° 15' 02.86" BT	0° 19' 28.43" LS	
	33	130° 15' 02.00" BT	0° 19' 36.65" LS	
	34	130° 14' 40.58" BT	0° 19' 29.16" LS	
	35	130° 14' 42.73" BT	0° 19' 18.99" LS	
	36	130° 14' 20.43" BT	0° 19' 03.24" LS	
	39	130° 12' 11.69" BT	0° 22' 04.46" LS	
Perairan P. Meos Arar Kecil	40	130° 15' 42.91" BT	0° 24' 47.26" LS	2.708
	41	130° 18' 40.55" BT	0° 25' 49.20" LS	
	42	130° 20' 58.25" BT	0° 24' 01.75" LS	
	43	130° 19' 31.83" BT	0° 23' 08.13" LS	
	44	130° 18' 33.47" BT	0° 23' 09.73" LS	
	45	130° 16' 12.13" BT	0° 24' 02.20" LS	
	46	130° 16' 34.31" BT	0° 24' 27.45" LS	
Perairan P. Gof Besar dan P. Gof Kecil	15	130° 21' 55.99" BT	0° 18' 01.93" LS	1.874
	19	130° 23' 06.23" BT	0° 18' 10.92" LS	
	47	130° 21' 55.58" BT	0° 18' 13.92" LS	
	48	130° 22' 59.05" BT	0° 20' 01.43" LS	
	49	130° 23' 15.65" BT	0° 21' 14.77" LS	
Perairan P. Gemien	52	130° 27' 36.11" BT	0° 20' 12.57" LS	4.331
	53	130° 28' 58.53" BT	0° 21' 50.42" LS	
	54	130° 31' 19.88" BT	0° 16' 45.58" LS	
	55	130° 29' 09.14" BT	0° 17' 28.61" LS	
<b>Sub Zona Pemanfaatan Tradisional</b>				
DPL Kampung Waisilip	56	130° 21' 48.29" BT	0° 15' 56.20" LS	59
	57	130° 21' 46.75" BT	0° 16' 04.68" LS	
	58	130° 22' 32.56" BT	0° 16' 05.22" LS	
DPL Kampung Bianci	14	130° 21' 31.00" BT	0° 17' 58.81" LS	31
	15	130° 21' 55.99" BT	0° 18' 01.93" LS	
	47	130° 21' 55.58" BT	0° 18' 13.92" LS	
	59	130° 21' 31.68" BT	0° 18' 13.92" LS	
DPL Kampung	49	130° 21' 11.41" BT	0° 21' 14.63" LS	687
	52	130° 20' 25.37" BT	0° 21' 52.64" LS	

Lokasi	No. Titk Koor dinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Selatan)	
Mutus	60	130° 21' 51.50" BT	0° 23' 14.26" LS	
	61	130° 22' 35.47" BT	0° 22' 19.98" LS	
DPL Kampung Meosmangg ara	40	130° 15' 42.91" BT	0° 24' 47.26" LS	117
	45	130° 16' 12.13" BT	0° 24' 02.20" LS	
	46	130° 16' 34.31" BT	0° 24' 27.45" LS	
	62	130° 15' 38.63" BT	0° 24' 29.05" LS	
DPL Kampung Manyai fun	32	130° 15' 02.86" BT	0° 19' 28.43" LS	26
	33	130° 15' 02.00" BT	0° 19' 36.65" LS	
	34	130° 14' 40.58" BT	0° 19' 29.16" LS	
	35	130° 14' 42.73" BT	0° 19' 18.99" LS	

## 2. Potensi

Untuk potensi dari masing-masing Zona Pemanfaatan dan Sub zona Pemanfaatan Tradisional dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12. Tabel Id Zona, Zona, Sub Zona dan Potensi Zona Pemanfaatan dan Sub zona Pemanfaatan Tradisional SAP Raja Ampat

Zona /Sub Zona	Lokasi	Potensi
Zona Pemanfaatan -	Perairan Kampung Manyai fun	Tutupan Terumbu Karang mencapai 40%, potensi <i>Bumphead Parrot Fish</i> , teluk dan tanjung bermangrove
	Perairan P. Meos Arar Kecil	Tutupan Terumbu Karang mencapai 40%, berpotensi ditemukan Hiu
	Perairan P. Gof Besar dan P. Gof Kecil	Tutupan Terumbu Karang mencapai 50%, berpotensi ditemukan Penyu Hijau dan Penyu Sisik dan Napoleon
	DPL Kampung Meosmanggara	Memiliki ekosistem mangrove yang luas dan hampir menutupi seluruh garis pantainya
Sub zona Pemanfaatan Tradisional	DPL Kampung Waisilip	Tutupan Terumbu Karang dikategorikan sedang dengan prosentase tutupan 41% dan didominasi oleh mushroom coral yang mencapai 90,91%, terdapat mangrove, berpotensi terdapat penyu hijau, kondisi ikan: didominasi oleh kelompok ikan hias, terdapat juga ikan kerapu, kakap, baronang, kakatua dan ikan kepe-kepe.
	DPL Kampung Bianci	Tutupan Terumbu Karang dikategorikan baik dengan prosentase tutupan 52%, didominasi oleh kategori ikan mayor (ikan hias) sebanyak 69,24%, ikan target sebanyak 28,7%, ikan indicator sebanyak 2,20%, terdapat kima berukuran besar sebanyak 9,09%,

Zona /Sub Zona	Lokasi	Potensi
	DPL Kampung Mutus	Tutupan Terumbu Karang mencapai 29%, karena Merupakan daerah karang gosong, yang didominasi oleh mushroom coral sekitar 98%, ikan hias mendominasi sekitar 58%, terdapat ikan ekonomis penting yaitu Kakap, Kerapu, beronang, kaka tua mencapai sekitar 36%, dan ikan kepe-kepe sebagai ikan indicator sekitar 4%.
	DPL Kampung Meosmanggara	Tutupan Terumbu Karang dikategorikan baik dengan prosentase tutupan sekitar 98%, ikan mayor sekitar 75%, ikan target sekitar 25%, ikan indicator sekitar 2%, terdapat mushroom coral sekitar 60%, kima kecil sekitar 40%,
	DPL Kampung Manyafun	Tutupan Terumbu Karang dikategorikan baik dengan prosentase tutupan sekitar 63%, selain karang keras terdapat kima besar sekitar 11%, berpotensi diemukan <i>Bumphead Parrot Fish</i> , terdapat ikan mayor sekitar 60%, ikan target sekitar 33%, ikan indicator 5%,

### 3. Peruntukan

#### 3.1 Zona Pemanfaatan

Peruntukan dan peraturan-peraturan untuk Zona Pemanfaatan adalah sebagai berikut:

1. Zona Pemanfaatan diperuntukkan untuk : perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan alur pelayaran.
2. Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan meliputi : perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan daya dukung habitatnya; perlindungan alur migrasi biota perairan; pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

3. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi : rekreasi pantai, menyelam; pariwisata tontonan seperti snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); pariwisata minat khusus; perahu pariwisata; olahraga permukaan air seperti berenang, selancar air (surfing), memancing catch and release (catch and release fishing), kite surfing, jetsky, dayung/kayak dan jenis olahraga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lain-lain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film.
4. Pembatasan ukuran kelompok wisatawan yang dapat melakukan kegiatan wisata dalam waktu yang bersamaan dan pembatasan jenis kegiatan dan usaha pariwisata disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang dikelola oleh Pengelola TNP;
5. Pengaturan waktu kegiatan (temporal atau musiman) atau minimisasi tekanan wisata ditetapkan jika diperlukan untuk mencegah gangguan pembiakan atau proses pemijahan ikan;
6. Jenis pengusahaan pariwisata yang diperbolehkan yaitu usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.
7. Usaha penyediaan jasa wisata alam meliputi: Perjalanan wisata, yaitu jasa penyediaan paket wisata; Transportasi, yaitu jasa menghubungkan wisatawan dari tempat asal menuju daerah tujuan wisata hingga mencapai obyek wisata; Pramuwisata, yaitu jasa penyediaan bimbingan atau pemanduan perjalanan ke obyek wisata berdasarkan pengetahuan khusus dan mendalam; Makanan dan minuman, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan; dan Informasi pariwisata, yaitu jasa penyediaan paket wisata, sarana dan prasarana transportasi, akomodasi hingga pemanduan di daerah tujuan wisata;
8. Usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi: Wisata tirta, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan berbagai kegiatan olah raga air dan wisata tontonan seperti tabung selam, fin, papan selancar dan glass boat; Akomodasi, yaitu sarana dan pelayanan untuk penginapan wisatawan seperti hotel, penginapan/homestay; dan Sarana wisata petualangan, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan kegiatan bernuansa petualangan seperti kapal layar (cruise), kapal selam (submarine) dan sea walker.

9. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi : penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi.
10. Kegiatan yang diperbolehkan di Zona Pemanfaatan untuk pendidikan meliputi: pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati; perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Taman Nasional Perairan.

### 3.2 Sub Zona Pemanfaatan Tradisional

Sub Zona Pemanfaatan Tradisional peraturan pada umumnya sama dengan zona Pemanfaatan, hanya mempunyai kekhususan hanya dapat di peruntukan oleh masyarakat adat setempat, sub zona pemanfaatan tradisional ini tidak diperuntukan untuk investasi dari luar masyarakat setempat, ini dikarenakan sub zona pemanfaatn tradisional merupakan DPL (Daerah Perlindungan Laut) yang telah di bentuk masyarakat yang berada di Kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, di mana masyarakat menerapkan daerah larang tangkap tetapi bisa dijadikan sebagai atraksi wisata di Kawasan Konservasi Perairan

#### 4. Kegiatan yang Boleh dan tidak boleh

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh yang dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan sub zona pemanfaatan tradisional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Tabel Kegiatan yang boleh dan tidak boleh yang dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan sub zona pemanfaatan tradisional

<b>Perumusan Kegiatan</b>	<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>
Kegiatan yang diperbolehkan	1	Patroli pengawasan
	2	Tambatan perahu
	3	Pembangunan Rumah Adat
	4	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor)
	5	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga,

<b>Perumusan Kegiatan</b>	<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>
		Jetty)
	6	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	7	Alur Kapal untuk perhubungan
	8	Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan
Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin	1	Monitoring dan Penelitian non ekstraktif
	2	Monitoring dan Penelitian ekstraktif
	3	Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, mangrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan
	4	Pembangunan Infrastruktur home stay, dan sarana penginapan lainnya
	5	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)
	6	Rekreasi pantai
	7	Wisata menyelam
	8	Wisata snorkeling
	9	Wisata Jet Ski
	10	Wisata Kayak/Dayung
	11	Wisata Surfing
	12	Wisata Kite surfing
	13	Wisata Mancing (Catch and Release)
	14	Wisata perahu kaca (glass boat)
	15	Perahu wisata
	16	Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba
	17	Wisata melihat burung
	18	Wisata mangrove
	19	Wisata Budaya
	20	Wisata tracking
	21	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Penangkapan ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored))
	2	Penangkapan ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets)
	3	Penangkapan ikan dengan Jaring insang oseanik
	4	Penangkapan ikan dengan Jaring angkat (Lift

<b>Perumusan Kegiatan</b>	<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>
		Net)
	5	Penangkapan ikan dengan Jaring serok (scoop net)
	6	Penangkapan ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net)
	7	Penangkapan ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net)
	8	Penangkapan ikan dengan Bubu
	9	Penangkapan ikan dengan Pancing ulur
	10	Penangkapan ikan dengan Pancing tonda
	11	Penangkapan ikan dengan Pancing layang-layang
	12	Penangkapan ikan dengan Sero
	13	Penangkapan ikan dengan Jermal
	14	Penangkapan ikan dengan Rawai Tuna
	15	Penangkapan ikan dengan Rawai Hanyut
	16	Penangkapan ikan dengan Rawai Tetap
	17	Penangkapan ikan dengan Rawai Hiu/Cucut
	18	Penangkapan ikan dengan Huhate
	19	Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang)
	20	Pemasangan Rumpon
	21	Rumpon telur ikan terbang
	22	Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom
	23	Menangkap Ikan Hias
	24	Menangkap ikan dengan senapan dan tombak
	25	Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan
	26	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas
	27	Penangkapan ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal
	28	Penangkapan ikan dengan Lampara dasar
	29	Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	30	Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	31	Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll)
	32	Mengambil dan menjual telur penyu
	33	Budidaya Rumput Laut
	34	Budidaya Mutiara

<b>Perumusan Kegiatan</b>	<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>
	35	Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA)
	36	Budidaya Teripang
	37	Budidaya Lobster
	38	Membangun Tambak
	39	ALKI III
	40	Penebangan Mangrove
	41	Pengambilan Karang hidup atau mati
	42	Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Rajua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat.
	43	Penambangan Pasir Laut
	44	Survey Seismic Minyak dan Gas
	45	Penambangan Minyak dan Gas
	46	Pembuangan Limbah dan Sampah

Dari beberapa Uraian di atas, dapat kita masukkan aturan zonasi untuk beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 14. Aturan zonasi untuk beberapa kegiatan dalam SAP Raja Ampat

<b>Kegiatan</b>	<b>ZI</b>	<b>ZP</b>		<b>ZPB</b>	
		SzP	SzPt	SzP	SzB
Inventarisasi dan kajian sumberdaya(baseline)	Y	Y	Y	Y	Y
Penelitian oleh pengelola	Y	Y	Y	Y	Y
Penelitian oleh pihak luar pengelola	YP	YP	YP	YP	YP
Monitoringt sumberdaya oleh pengelola	Y	Y	Y	Y	Y
Pendidikan Lingkungan (didampingi pengelola)	YP	YP	YP	YP	YP
Rehabilitasi sumberdaya	Y	Y	Y	Y	Y
Penambahan stok sumberdaya	Y	Y	Y	Y	Y
Pengendalian hama dan penyakit	Y	Y	Y	Y	Y
Pengawasan	Y	Y	Y	Y	Y
Pembangunan infrastruktur besar pengelola (kantor)	N	Y	N	Y	Y
Pembangunan infrastruktur kecil pengelola (shelter)	N	Y	Y	Y	Y
Pembangunan fasilitas pengunjung (tanda-tanda)	N	Y	Y	Y	Y
Pembangunan fasilitas wisata	N	Y	N	Y	Y
Pembangunan permukiman dan fasilitasnya	N	N	N	N	N



BAB IV  
RENCANA JANGKA PANJANG

A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya

1. Review Terhadap Kebijakan Nasional dan Lokal terkait dengan Suaka Alam Perairan

Landasan hukum dan kebijakan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan perubahannya tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, termasuk didalamnya dengan mencadangkan kawasan konservasi laut. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan mengenai kawasan konservasi perairan dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Menurut Pasal 28 ayat (1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk: (a) menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b) melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya; (c) melindungi habitat biota laut, dan (d) melindungi situs budaya tradisional. Penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Sementara itu, berdasarkan Pasal 28 ayat 6, untuk mencapai tujuan konservasi, Menteri menetapkan: (a) Kategori Kawasan Konservasi; (b) Kawasan Konservasi Nasional; dan (c) Pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi, dan hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan dimaksud.

Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan tentang perlindungan sumber daya ikan sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 8*: Konservasi Sumber daya Ikan adalah Upaya *Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan* sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
- *Pasal 13 ayat (1)* :Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan dilakukan upaya *konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan*. Pemerintah dapat melakukan penetapan KK antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan .

Dengan demikian, Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi di wilayah yang dipandang perlu antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.

Mengenai kewenangan daerah dalam konservasi wilayah pesisir dan pulau kecil, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat 4 dimana negara memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan, pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pasal 15 pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya; (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 17 juga menyebutkan bahwa: (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; (2) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh

satuan unit organisasi pengelola; (3) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan; (4) Zonasi kawasan konservasi perairan terdiri atas: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.

Selanjutnya Pasal 47 pada Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan, bahwa: (1) Dalam rangka konservasi sumber daya ikan dilakukan pengawasan; (2) pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (a) penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan; dan (b) pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi; (3) pengawasan dilaksanakan oleh pengawas perikanan, yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; dan (4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan konservasi sumber daya ikan.

## 2. Kebijakan dan Strategi Konservasi Perairan

Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya ikan secara keseluruhan. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya akan menimbulkan masalah-masalah yang pelik dan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya harus dapat terimplementasikan dalam berbagai perangkat kebijakan maupun program pemerintah. Sebagai pelaksanaan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menetapkan visi, yaitu Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimum dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Visi ini dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

- a. Memfasilitasi terwujudnya penataan ruang untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. Memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untuk mewujudkan wilayah pesisir dan lautan yang bersih, sehat, produktif dan aman;
- c. Mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat;
- d. Mengembangkan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya.

Strategi pengembangan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh KKP, melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan antara lain:

- a) perluasan kawasan konservasi laut, dengan target 10 (sepuluh) juta hektar pada tahun 2010 dan 20 (dua puluh) juta hektar pada tahun 2020;
- b) melakukan upaya pengelolaan efektif Kawasan Konservasi Perairan yang meliputi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan, serta pengembangan kawasan percontohan;
- c) melakukan pendekatan ilmiah, termasuk: eco-regional, resilient, and resistant principles;
- d) memantapkan jaringan global dan kerjasama dalam pengelolaan KKP;
- e) implementasi kolaborasi pengelolaan dalam kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM);
- f) penguatan pengelolaan KKP melalui program “Capacity Building”;
- g) pengembangan mekanisme pendanaan, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

### 3. Visi dan Misi Pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya

Visi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya adalah “Terwujudnya SAP Kepulauan Raja Ampat sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya”.

Sedangkan misi SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya, adalah:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam kerangka jejaring KKP Raja Ampat dan sistem pengelolaan yang berbasis ekosistem, keterpaduan, adaptif, partisipatif, dan didukung secara luas oleh para pihak.
2. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan sebagai upaya perlindungan sumber daya alam untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya.

### 4. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

#### a. Tujuan Pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya adalah:

1. Membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dan para pihak dalam mengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya.
2. Membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi unit pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dengan unit pengelola KKPD Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Propinsi Papua Barat didalam pengelolaan kedua KKPN tersebut khususnya maupun pengelolaan jejaring KKP di Raja Ampat umumnya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan program dan kegiatan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat meliputi perikanan, pariwisata, pelibatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, monitoring dan pengawasan.

## b. Sasaran Pengelolaan

Sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya adalah:

1. Terbentuknya lembaga pengelola yang efektif dan efisien dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
2. Terwujudnya kerjasama dan koordinasi antara unit pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dengan unit pengelola KKPD Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Propinsi Papua Barat didalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat jejaring KKP Raja Ampat.
3. Terlaksananya program dan kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, monitoring dan pengawasan di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

## B. Strategi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya

Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat yaitu (a) Penguatan kelembagaan, (b) Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, (c) Penguatan sosial, ekonomi dan budaya.

### a. Penguatan kelembagaan

Belajar dari keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi diberbagai tempat, salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sebuah kawasan konservasi terletak pada keberadaan lembaga pengelola dilapangan serta kemampuan dan kapasitas lembaga pengelola tersebut dalam mengelola kawasan. Lembaga pengelola yang handal diharapkan dapat menjadi motor penggerak maupun pelaksana program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan. Faktor lain dalam menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pihak terkait pengelolaan kawasan.

Program untuk melaksanakan strategi pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat melalui penguatan kelembagaan, sebagai berikut:

- a) Pembentukan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat
  - b) Penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat
  - c) Penguatan kapasitas para pihak terkait pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat
  - d) Pembangunan infrastruktur pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat
  - e) Pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan aturan pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat
  - f) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat
  - g) Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan
- b. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan

Sebagai sebuah kawasan konservasi yang terletak didalam wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat, sejumlah kampung yang telah ada baik didalam maupun sekitar kawasan, dan juga pihak swasta yang telah mengembangkan sejumlah resort, terdapat sejumlah kepentingan dari berbagai pihak terhadap SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah memiliki kepentingan terhadap kawasan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung baik di dalam dan sekitar kawasan serta kepentingan terhadap pembangunan Kabupaten Raja Ampat. Masyarakat atau nelayan yang tinggal di kampung-kampung di dalam atau sekitar kawasan, memanfaatkan perairan kawasan untuk mencari ikan dan sumber daya alam laut lainnya. Marga-marga di kampung memiliki hak petuanan di laut. Swasta pengelola resort berkepentingan terhadap kelestarian sumber daya kawasan sebagai obyek minat dari kedatangan turis. Kerjasama para pihak tersebut dengan lembaga pengelola penting untuk keberhasilan pengelolaan kawasan.

Program untuk melaksanakan strategi pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat melalui penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, sebagai berikut:

- a) Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya.
  - b) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring KKP Raja Ampat
  - c) Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat..
  - d) Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.serta jejaring KKP Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.
  - e) Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.pada berbagai tingkatan pemerintahan.
  - f) Monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan
- c. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Sumber daya

Pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya sosial, budaya dan ekonomi di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status dan fungsinya. Kelestarian sumber daya alam serta terpeliharanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Sekitarnya merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya seperti ikan penting selain untuk menjamin kelestariannya, juga menjamin sumber protein dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Pengelolaan terumbu karang penting untuk tetap mempertahankan Raja Ampat sebagai daya tarik dan tujuan wisata.

Program pengelolaan untuk melaksanakan strategi pengembangan pengelolaan sumber daya sebagai berikut:

- (1) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah
- (2) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP

Tabel 15. Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi SAP Kepulauan Raja Ampat

No	Strategi	Program	Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
			Pelatihan monitoring dan pengawasan
			Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu
			Pelatihan penyadaran masyarakat dan komunikasi
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP
			Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP
			Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP
			Pelatihan penegakan hukum lingkungan
			Penata kelolaan kelembagaan
	Menyusun model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat yang efektif		
	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya		
	Pengembangan kebijakan		Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan
			Penyusunan dan sosialisasi pemanfaatan kawasan baik untuk pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian
			Penyusunan dan sosialisasi pemantauan kawasan

No	Strategi	Program	Kegiatan
			Penyusunan protokol monitoring sumber daya di dalam kawasan
			Penyusunan protokol kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian, maupun studi banding
			Penyusunan protokol penyelesaian konflik
			Verifikasi batas-batas terluar SAP
			Pembuatan tanda batas di dalam dan diluar SAP
			Diskusi status SAP Kepulauan Raja Ampat dan status kawasan konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat
			Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti
			Pembangunan kantor unit organisasi pengelola SAP di Ibukota Kabupaten Raja Ampat
			Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan
			Pembangunan kantor lapangan unit organisasi pengelola di dekat lokasi SAP Kepulauan Raja Ampat
			Pengadaan kendaraan untuk mobilisasi personil baik mobil, maupun sepeda motor untuk kantor unit organisasi pengelola di Ibukota kabupaten
			Pengadaan alat komunikasi telepon dan internet baik di kantor unit organisasi pengelola di Ibukota kabupaten maupun di kantor lapangan
			Pengadaan speed boat untuk masing-masing kantor dengan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
			Pembangunan menara pengawas di titik-titik strategis SAP
			Pembangunan pusat informasi kawasan konservasi di Ibukota kabupaten dan di dalam lokasi SAP
			Pembangunan sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di lokasi SAP

No	Strategi	Program	Kegiatan
			Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia
			Kajian keterhubungan biofisik antar SAP Kepulauan Raja Ampat dengan KKP lainnya pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
			Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan sumber daya
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif
			Pelatihan bisnis yang sering dengan konservasi
			Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik
			Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP
			Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional
			Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya
			Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional
			Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan
		Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan	Evaluasi struktur kelembagan pengelola
			Evaluasi kompetensi personel dalam struktur lembaga pengelola
			Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAPRaja Ampatsecara efektif

No	Strategi	Program	Kegiatan
		Program Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	<p>Studi model sistem pendanaan SAP Kepulauan Raja Ampat</p> <p>Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan</p> <p>Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan</p> <p>Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor</p> <p>Sosialisasi pengelolaan SAP dengan lembaga-lembaga donor</p>
		Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	<p>Studi model kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat Tenggara serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional</p> <p>Identifikasi dan kajian kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP</p> <p>Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional</p> <p>Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional</p>
		Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat pada berbagai tingkatan pemerintahan	<p>Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Raja Ampat maupun jejaring Kawasan Konservasi Nasional bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum</p> <p>Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok pengawas masyarakat</p> <p>Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Raja Ampat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, provinsi maupun kementerian terkait</p>

No	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Raja Ampat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat</p> <p>Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Raja Ampat dengan instansi penegak hukum</p>
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	<p>Monitoring dan evaluasi potensi sumber daya</p> <p>Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya</p>	<p>Pemetaan detail potensi kawasan tiap zona dalam rangka perlindungan habitat dan populasi ikan</p> <p>Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan SAP</p> <p>Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan</p> <p>Rehabilitasi mangrove</p> <p>Rehabilitasi padang lamun di <i>feeding grounds</i> penyu</p> <p>Pengkajian dan evaluasi kondisi stok perikanan</p> <p>Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan</p> <p>Transplantasi terumbu buatan</p> <p>Restocking ikan-ikan ekonomis penting</p> <p>Pengkajian konektifitas ekologi SAP dengan KKP di sekitarnya</p> <p>Pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster</p> <p>Pengkajian status ekologi di SAP Kepulauan Raja Ampat</p> <p>Monitoring kesehatan karang secara berkala</p> <p>Monitoring kondisi mangrove secara berkala</p> <p>Monitoring peneluran penyu secara berkala</p> <p>Monitoring SPAGs secara berkala</p> <p>Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan Raja Ampat</p> <p>Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang</p>

No	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat</p>
		Monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan	Kajian dan evaluasi kondisi ekologi
			Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat
			Kajian dan evaluasi tata kelola kawasan
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekitar kawasan</p> <p>Pemanfaatan Sumber daya Perikanan secara berkelanjutan</p> <p>Pelestarian Adat dan Budaya</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Pengembangan Kegiatan Ekonomi Non-Perikanan</p> <p>Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP</p> <p>Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara reguler</p> <p>Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah</p> <p>Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP</p>

## BAB V

### RENCANA JANGKA MENENGAH

#### A. Umum

Rencana pengelolaan jangka menengah SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pengelolaan jangka panjang. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sebuah kawasan konservasi terletak pada keberadaan lembaga pengelola yang kuat serta kemampuan dan kapasitas lembaga pengelola tersebut dalam mengelola kawasan. Lembaga pengelola yang handal diharapkan dapat menjadi motor penggerak maupun pelaksana program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan. Faktor lain dalam menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pihak terkait pengelolaan kawasan.

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat adalah kelestarian sumber daya yang dikelola. Untuk itu pemantauan dan evaluasi status sumber daya perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan apakah upaya pengelolaan yang telah dan akan dilakukan kedepannya sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan SAP yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi berarti juga menemukan/mencari kendala dalam kegiatan pengelolaan, analisis permasalahan, serta menemukan jalan pemecahannya. Dokumen hasil pemantauan yang dilakukan di atas merupakan bahan utama evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun sekali, yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan SAP pada tahun berikutnya.

#### B. Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama)

##### 1. Penguatan Kelembagaan

##### a. Pembentukan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat

Saat ini pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dibawah Balai Kawasan

Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) yang berlokasi di Kupang. Balai KKPN ini mendapat mandat untuk mengelola 8 (delapan) Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang tersebar di kawasan timur Indonesia, termasuk SAP Kepulauan Raja Ampat. Letak Balai KKPN yang jauh dari SAP Kepulauan Raja Ampat yang berada di Kabupaten Raja Ampat membuat pengelolaan SAP ini sulit untuk dilakukan dan dapat menimbulkan persepsi tidak adanya lembaga pengelola SAP dilapangan.

Kegiatan untuk menjalankan program ini adalah:

- (1) Studi model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat
- (2) Pembentukan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat
- (3) Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola

b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat

Program penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola dilakukan melalui kegiatan:

- (1) Pelatihan pengelolaan organisasi
- (2) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
- (3) Pelatihan monitoring dan pengawasan
- (4) Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database
- (5) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik

c. Pembangunan infrastruktur pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan dalam program pembangunan infrastruktur SAP Kepulauan Raja Ampat sebagai berikut:

- (1) Verifikasi batas-batas terluar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
- (2) Diskusi status SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. dan status KKLD Raja Ampat antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- (3) Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti.

- (4) Pembangunan kantor unit organisasi pengelola di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat
  - (5) Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan
- d. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan aturan pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan terkait pengembangan kebijakan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya
  - (2) Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan
  - (3) Penyusunan dan sosialisasi pemanfaatan kawasan baik untuk pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian
  - (4) Penyusunan dan sosialisasi pemantauan kawasan
  - (5) Penyusunan protokol monitoring sumber daya didalam kawasan
  - (6) Penyusunan protokol kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian maupun studi banding.
  - (7) Penyusunan protokol penyelesaian konflik
- e. Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring KKP Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

- (1) Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.
- (2) Kajian keterhubungan biofisik antar SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

dengan KKP lainnya pada tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional.

## 2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan

Program pengelolaan untuk melaksanakan strategi pengembangan pengelolaan sumber daya sebagai berikut :

### a. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP sebagai berikut:

- (1) Pemetaan detail potensi kawasan tiap zona dalam rangka perlindungan habitat dan populasi ikan.
- (2) Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan di SAP
- (3) Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan
- (4) Rehabilitasi mangrove
- (5) Rehabilitasi padang lamun di *feeding grounds* penyu
- (6) Pengkajian dan evaluasi kondisi stok perikanan.
- (7) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.

### b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya serta efektivitas pengelolaan kawasan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya serta efektifitas pengelolaan kawasan meliputi:

- (1) Pengkajian status ekologi, baik kondisi terkini terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai peneluran penyu, *feeding grounds* penyu, tempat pemijahan ikan (*Spawning Agregation Sites* ~ SPAGs), dan tempat-tempat penting lainnya
- (2) Monitoring kesehatan karang secara berkala
- (3) Monitoring kondisi mangrove secara berkala
- (4) Monitoring peneluran penyu secara berkala
- (5) Monitoring SPAGs secara berkala
- (6) Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat.
- (7) Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang.
- (8) Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum.

- (9) Monitoring arus kunjungan wisata yang datang ke SAP Kepulauan Raja Ampat serta dampak yang ditimbulkan baik yang bersifat positif maupun negatif.
  - (10) Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat
  - (11) Kajian dan evaluasi kondisi ekologi
  - (12) Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat
  - (13) Kajian dan evaluasi tata kelola kawasan
3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya

Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan dilakukan melalui program antara lain:

- 1) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP
- 2) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah
- 3) Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara reguler.

### C. Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Kedua)

#### 1. Penguatan Kelembagaan

##### a. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelola kawasan meliputi:

- 1) Evaluasi struktur kelembagaan pengelola
- 2) Evaluasi kompetensi personel dalam struktur lembaga pengelola
- 3) Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat secara efektif.

##### b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Program penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola dilakukan melalui kegiatan:

- (1) Pelatihan pengelolaan organisasi
- (2) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
- (3) Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu
- (4) Pelatihan monitoring dan pengawasan

- (5) Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database
  - (6) Pelatihan penyadartahuan dan komunikasi
  - (7) Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP
  - (8) Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP
  - (9) Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP
  - (10) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik
  - (11) Pelatihan penegakan hukum lingkungan
- c. Pembangunan infrastruktur pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
- Kegiatan dalam program pembangunan infrastruktur SAP Kepulauan Raja Ampat sebagai berikut:
- 1) Pembangunan kantor lapangan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat
  - 2) Pengadaan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor untuk kantor unit organisasi pengelola di Waisai
  - 3) Pengadaan alat komunikasi telepon dan internet baik di kantor unit organisasi pengelola di Waisai maupun di kedua kantor lapangan
  - 4) Pengadaan speed boat untuk masing-masing kantor dengan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
  - 5) Pembangunan menara pengawas di titik-titik strategis pada setiap SAP
  - 6) Pembangunan pusat informasi pengunjung di Waisai dan di lokasi SAP
  - 7) Pembangunan sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di lokasi SAP
- d. Penguatan kapasitas para pihak terkait pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
- Keterlibatan para pihak dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Agar kualitas partisipasi para pihak ini memadai dalam pengelolaan kawasan, maka kapasitasnya perlu dibangun dan ditingkatkan.

Kegiatan-kegiatan dalam program peningkatan kapasitas para pihak terdiri dari:

- 1) Pelatihan KKP dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
  - 2) Pelatihan monitoring dan pengawasan sumber daya
  - 3) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
  - 4) Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif.
  - 5) Pelatihan bisnis konservasi
  - 6) Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik
  - 7) Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP
  - 8) Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan
- e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak sebagai berikut:

- (1) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan jejaring KKP Raja Ampat
- (2) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya

## 2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan

Program pengelolaan untuk melaksanakan strategi pengembangan pengelolaan sumber daya sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP sebagai berikut:

1. Pengkajian konektifitas ekologi SAP Kepulauan Raja Ampat dengan KKP di sekitarnya
2. Transplantasi terumbu buatan
3. Restocking ikan-ikan ekonomis penting

## 3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan dilakukan melalui program antara lain :

## 1. Pemberdayaan Masyarakat

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengertian masyarakat mencakup pengusaha penyedia jasa, masyarakat birokrat khususnya yang menanganiperizinan, masyarakat lokal yang akan menerima, melayani, para wisatawan dan menjaga kelestarian sumber daya yang ada di wilayah SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Pemberdayaan dalam pengertian semua pihak melaksanakan tugas kewajiban masing-masing dengan tepat, cepat, menyenangkan pengguna jasa yang memerlukan layanan.

Masyarakat adalah pemukim di setiap pulau dalam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang menggantungkan hidupnya, sebagian atau seluruhnya, pada sumber daya alam di sekitar kawasan. Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam menjalin kerjasama semua pihak terutama masyarakat lokal. Selama masyarakat setempat masih dianggap obyek pengelolaan, akan sulit terjalin kerja sama, koordinasi dan komunikasi seperti yang diharapkan.

Untuk mewujudkan pola pengelolaan secara efisien dan efektif, pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dituntut berperan dalam pengembangan masyarakat setempat, sebagai fasilitator bagi kegiatan pemanfaatan ekstraktif terbatas. Untuk mendukung hal tersebut, Pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif dengan semua stakeholder pembangunan, terutama komunitas masyarakat lokal. Adapun kegiatan yang perlu dijalankan dalam rangka mengajak masyarakat dalam penyatuan pengelolaan adalah dengan *Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Perencanaan dan kegiatan*.

## 2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Non-Perikanan

Pengembangan potensi ekonomi non perikanan dalam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat cukup perlu dikembangkan terutama untuk mendukung pengelolaan kawasan seperti kegiatan keterampilan dalam pembuatan cendera mata (souvenir) dari bahan baku berbasis sumber daya laut, rental peralatan penyelaman, dan kader konservasi. Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa-jasa wisata, dan berbagai kegiatan insidental yang memberikan

manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan seperti kegiatan seni dan budaya.

#### D. Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ketiga)

##### 1. Penguatan Kelembagaan

- a. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan jejaring KKP Raja Ampat sebagai berikut:

- (1) Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring KKP Raja Ampat
- (2) Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring KKP Raja Ampat

- b. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan dalam pengembangan sistem pendanaan untuk pengelolaan kawasan sebagai berikut:

- (1) Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan
- (2) Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
- (3) Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor
- (4) Sosialisasi pengelolaan SAP dengan lembaga-lembaga donor

##### 2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan

1. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP Kepulauan Raja Ampat sebagai berikut :

- (1) Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan
- (2) Rehabilitasi mangrove
- (3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.

### 3. Penguatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Kegiatan penguatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

- (1) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP
- (2) Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara reguler.

## E. Rencana Jangka Menengah IV (5 Tahun Keempat)

### 1. Penguatan Kelembagaan

#### a. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring KKP Raja Ampat

Kegiatan dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan jejaring KKP Raja Ampat sebagai berikut:

- (1) Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat.

#### b. Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Raja Ampat maupun jejaring KKP Raja Ampat bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum
- (2) Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok pengawas masyarakat
- (3) Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Raja Ampat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, propinsi maupun kementerian terkait
- (4) Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Raja Ampat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

- (5) Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Raja Ampat dengan instansi penegak hukum
- c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat
- Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak sebagai berikut:
- (1) Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat dan jejaring KKP Raja Ampat
  - (2) Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan
2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan
1. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.  

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster
  2. Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya  

Kegiatan penguatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat SAP Kepulauan Raja Ampat adalah sebagai berikut:

    - (1) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah
    - (2) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP

Tabel 16. Matriks Rencana Pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat 5 Tahun Pertama (2014-2019)

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	
			Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database	
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik	Kemampuan pengelola meningkat dalam mengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dan mendapatkan lesson learnt yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan
		Penata kelolaan kelembagaan	Pembentukan unit kerja Pengelola Kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat	Terbentuknya unit kerja pengelola kawasan
			Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas	Formasi personel SAP Kepulauan Raja Ampat Sawu direkrut berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan
			Menyusun model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat yang efektif	Model tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan mengetahui informasi zonasi dan peraturan-peraturannya
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	
			Penyusunan dan sosialisasi pemanfaatan kawasan baik untuk	Dokumen pendukung pengelolaan kawasan konservasi

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian	
			Penyusunan dan sosialisasi pemantauan kawasan	
			Penyusunan protokol monitoring sumber daya di dalam kawasan	
			Penyusunan protokol kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian, maupun studi banding	
			Penyusunan protokol penyelesaian konflik	
		Pengembangan infrastruktur	Verifikasi batas-batas terluar SAP	Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
			Pembuatan tanda batas di dalam dan diluar SAP	
			Diskusi status SAP Kepulauan Raja Ampat dan status kawasan konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan
			Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti	Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
			Pembangunan kantor unit organisasi pengelola SAP di Ibukota Kabupaten Raja Ampat	Sarana dan prasaranan pengelola untuk menunjang pengelolaan
			Pengadaan papan-papan	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan	
		Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat	Pemetaan detail potensi kawasan tiap zona dalam rangka perlindungan habitat dan populasi ikan	Peta detail potensi kawasan konservasi
			Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan SAP	Dokumen pengkajian nilai ekonomi dan ekologi
			Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lokasi-lokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi
			Rehabilitasi mangrove	
			Rehabilitasi padang lamun di <i>feeding grounds</i> penyu	
			Pengkajian dan evaluasi kondisi stok perikanan	Dokumen evaluasi kondisi stok perikanan
			Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan	Adanya aktifitas perikanan yang berkelanjutan

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya	Pengkajian status ekologi di SAP Kepulauan Raja Ampat	Dokumen pengkajian status ekologi SAP Kepulauan Raja Ampat
			Monitoring kesehatan karang secara berkala	Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana dan hasilnya digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan
			Monitoring kondisi mangrove secara berkala	
			Monitoring peneluran penyu secara berkala	
			Monitoring SPAGs secara berkala	
			Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan Raja Ampat	
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	
			Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum	
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat		
		Monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan	Kajian dan evaluasi kondisi ekologi	Dokumen kajian dan evaluasi kondisi ekologi
			Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat	Dokumen kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat
			Kajian dan evaluasi tata kelola kawasan	Dokumen kajian dan evaluasi tata kelola masyarakat

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi Dan Budaya		Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekitar kawasan	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekitar kawasan
			Pemanfaatan Sumber daya Perikanan secara berkelanjutan	Adanya aktifitas perikanan yang ramah lingkungan
			Pelestarian Adat dan Budaya	Adanya peran serta pengelolaan kawasan konservasi dalam mendukung kearifan lokal setempat

Tabel 16. Matriks Rencana Pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat 5 Tahun Kedua (2019-2024)

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	
		Penata kelolaan kelembagaan	Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya petugas pengelola yang profesional
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan mengetahui informasi zonasi dan peraturan-peraturannya
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	
		Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan
Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan	Evaluasi struktur kelembagaan pengelola	Dokumen evaluasi sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan		
	Evaluasi kompetensi personel dalam			

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			struktur lembaga pengelola	
			Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAPRaja Ampat secara efektif	
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat	Rehabilitasi mangrove Rehabilitasi padang lamun di <i>feeding grounds</i> penyu	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lokasi-lokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi
		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya	Monitoring kesehatan karang secara berkala Monitoring kondisi mangrove secara berkala Monitoring peneluran penyu secara berkala Monitoring SPAGs secara berkala Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana dan hasilnya digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan

Tabel 16. Matriks Rencana Pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat 5 Tahun Ketiga (2024-2029)

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	
			Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database	
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik	Laporan studi banding sebagai masukan terhadap pengelolaan kawasan konservasi
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu	
			Pelatihan penyadaran masyarakat dan komunikasi	
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP	
			Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP	
		Pelatihan penegakan hukum lingkungan		
		Penata kelolaan kelembagaan	Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya petugas pengelola yang profesional
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan mengetahui informasi

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	zonasi dan peraturan-peraturannya
		Pengembangan infrastruktur	Pembuatan tanda batas di dalam dan diluar SAP	Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
			Diskusi status SAP Kepulauan Raja Ampat dan status kawasan konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan
			Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti	Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
		Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan
		Peningkatan kapasitas para pihak	Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan sumber daya	
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternative	
			Pelatihan bisnis yang sering dengan konservasi	
			Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik	Laporan studi banding sebagai bahan masukan pengelolaan kawasan konservasi
			Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting konservasi perairan
		Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan	Evaluasi struktur kelembagaan pengelola	Terlaksananya evaluasi struktur kelembagaan
		Program Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	Studi model sistem pendanaan SAP Kepulauan Raja Ampat	Dokumen studi model pendanaan SAP Kepulauan Raja Ampat
			Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan	Dokumen alternatif pendanaan yang berkelanjutan SAP Kepulauan Raja Ampat
			Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	Dokumen strategp sistem pendanaan berkelanjutan
			Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor	Terlaksananya model sistem pendanaan dan koordinasi

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Sosialisasi pengelolaan SAP dengan lembaga-lembaga donor	Stakeholder terkait di dalam kawasan mengetahui informasi pengelolaan kawasan konservasi
		Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Studi model kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat Tenggara serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Dokumen model kelembagaan pengelola kawasan konservasi
			Identifikasi dan kajian kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP	
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat	Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lokasi-lokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi
			Restocking ikan-ikan ekonomis penting	Terlaksananya kegiatan restocking sumber daya sesuai kebutuhan
		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya	Monitoring kesehatan karang secara berkala	Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana dan hasilnya digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan
			Monitoring kondisi mangrove secara berkala	
			Monitoring peneluran penyu secara berkala	
			Monitoring SPAGs secara berkala	
Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan Raja Ampat				
Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas,				

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	<p>Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP</p> <p>Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara regular</p>	<p>Adanya hubungan kerjasama yang baik antara pengelola dan masyarakat</p> <p>Terlaksananya even-even budaya dalam mendukung tujuan SAP</p>

Tabel 17. Matriks Rencana Pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat 5 Tahun Keempat (2029-2034)

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP	
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP	
			Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP	
	Penata kelolaan kelembagaan	Pembangunan kebijakan	Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya petugas pengelola yang profesional
			Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan mengetahui informasi zonasi dan peraturan-peraturannya
	Pembangunan infrastruktur	Pembangunan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi	Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	
			Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan	Adanya media sosialisasi terkait kawasan konservasi perairan
		Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
		Nasional antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia		
		Peningkatan kapasitas para pihak	Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP	SDM Pengelola telah dididik dan dilatih sesuai dengan tupoksi
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan sumber daya	
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif	
			Pelatihan bisnis yang sering dengan konservasi	Laporan studi banding sebagai masukan terhadap pengelolaan kawasan konservasi
			Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik	
		Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting konservasi perairan
			Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Adanya kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi
			Koordinasi berkala dan penguatan	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			<p>kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional</p> <p>Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Raja Ampat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok pengawas masyarakat</p> <p>Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Raja Ampat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, provinsi maupun kementerian terkait</p> <p>Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Raja Ampat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat</p> <p>Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Raja Ampat dengan instansi penegak hukum</p>	
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	<p>Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat</p> <p>Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya</p>	<p>Pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster</p> <p>Monitoring kesehatan karang secara berkala</p> <p>Monitoring kondisi mangrove secara berkala</p>	<p>Dokumen kajian sumber daya kelautan</p> <p>Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana dan hasilnya digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan</p>

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Monitoring peneluran penyus secara berkala	pengelolaan
			Monitoring SPAGs secara berkala	
			Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan Raja Ampat	
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	
			Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum	
			Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat	
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah	Meningkatnya usaha masyarakat
			Pelestarian Adat dan Budaya	Adanya peran serta pengelolaan kawasan konservasi dalam mendukung kearifan lokal setempat

## BAB VI PENUTUP

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan oleh Satuan Organisasi Unit Pengelola Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya.

Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat diharapkan mendukung Rencana Pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya secara partisipatif. Mengingat pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat bersifat dinamis dan adaptif, maka Rencana Pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sekali.

Namun demikian, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono